



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 53 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN
LEVEL AKTIVITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI UTARA TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya risiko dan dampak suatu kejadian yang menghambat pencapaian tujuan atau sasaran instansi pemerintah pada level aktivitas operasional perlu dilakukan penanganan risiko secara tepat dengan melakukan penilaian risiko serta penetapan kegiatan pengendalian;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko, maka KPU Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan penilaian risiko level aktivitas serta telah merumuskan kegiatan pengendalian, yang hasilnya harus ditetapkan dalam sebuah Keputusan yang mengikat, supaya dapat dilaksanakan semua unsur dalam lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Penetapan Hasil Penilaian Risiko Dan Kegiatan Pengendalian Level Aktivitas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;

9. Peraturan...

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 125/PR.01.3/71/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1/PR.01.3/71/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 125/PR.01.3/71/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 128/PR.01.3/71/2021 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 131/PR.01.3/71/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 128/PR.01.3/71/2021 tentang Indikator Kinerja Utama di...

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024.

- Memerhatikan :
1. Laporan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPU Provinsi Sulut tentang Pelaksanaan Penilaian Risiko Level Aktivitas beserta lampirannya berupa Kertas Kerja Penilaian Risiko Level Aktivitas;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 45/PK.01-BA/71/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Keputusan Rapat Pleno Periodik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL AKTIVITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Aktivitas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Aktivitas sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU terdiri dari:

- a. Hasil Analisis Lingkungan Eksternal dan Internal sebagaimana Lampiran I Keputusan ini;
- b. Kriteria dan Skala yang digunakan dalam penilaian risiko, sebagaimana Lampiran II Keputusan ini;
- c. Penetapan Tujuan Level Aktivitas, sebagaimana Lampiran III Keputusan ini;
- d. Identifikasi Risiko, sebagaimana Lampiran IV Keputusan ini;
- e. Analisis Risiko yang diformulasikan dalam Peta Risiko, Lampiran V Keputusan ini;
- f. Indikator Risiko/Evaluasi Risiko, sebagaimana dalam Lampiran VI Keputusan ini; dan
- g. Kegiatan Pengendalian atau Rencana Aksi Pengendalian Risiko sebagaimana Lampiran VII Keputusan ini.

KETIGA...

- KETIGA : Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Aktivitas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan KEDUA, menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dalam melakukan kegiatan pengendalian level aktivitas.
- KEEMPAT : Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Aktivitas dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali di setiap tahun.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Provinsi Sulawesi Utara.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado

Pada tanggal 9 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

ARDILES M.R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan SDM



Carles Worotitjan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 53 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO
DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL
AKTIVITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
UTARA TAHUN 2022

HASIL ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL DAN INTERNAL

ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL DAN INTERNAL

| No | KATEGORI RISIKO | TOPIK RISIKO | PERNYATAAN RISIKO | POTENSI DAMPAK | REFERENSI |
|----|-----------------------------|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f |
| I | EKSTERNAL | | | | |
| 1 | Sosial & Politik | Regulasi yang terlambat ditetapkan | Kurang memahami peraturan dengan baik | Pelaksanaan tahapan tidak sesuai dengan regulasi | Laporan Penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020 |
| | | Komunikasi antar lembaga | Perbedaan pemahaman | Implementasi dalam penegakan aturan tidak maksimal | Sda |
| | | Birokrasi | Keterlambatan dalam pengambilan keputusan | KPU tidak maksimal dalam menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan birokrasi eksternal | Sda |
| | | Pelanggaran Administrasi Pemilu | Tidak Memenuhi syarat sebagai peserta pemilu | Sengketa pemilu | Sda |
| | | Pembagian Wilayah | Konflik administrasi kewilayahan | Mal administrasi | Sda |
| | | Relokasi Pemukiman Penduduk | Pemilih tidak menggunakan hak pilih | Turunnya partisipasi pemilih di daerah tersebut | Sda |
| | | Penerapan sosial distancing | Terganggunya interaksi sosial didalam kehidupan bermasyarakat | kurangnya pemahaman masyarakat dalam proses tahapan pemilu dan pilkada tahun 2024 | Laporan Penyelenggaraan Pemilihan 2020 |
| | | Belum ditetapkannya program tahapan dan jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 | Terciptanya opini, asumsi dan wacana yang beragam dikalangan masyarakat | Terjadi kegamangan ditengah masyarakat atas ketidak pastian pelaksanaan pemilu dan pilkada tahun 2024 | Perkembangan RDP Penyelenggara Pemilu dengan DPR dan Pemerintah di Akhir Tahun 2021 |
| | | Partai Politik yang mempengaruhi keputusan dari KPU | KPU tidak mandiri dalam mengambil keputusan | Personil KPU tidak netral dalam mengambil keputusan, berpotensi mendapatkan sanksi kode etik | Laporan Tahunan DKPP Tahun 2019-2021 |
| 2 | Ekonomi | Kondisi ekonomi akibat pandemi | Tidak adanya dukungan fasilitas anggaran dari Pemerintah Kabupaten/Kota | Tidak berjalannya kegiatan Non Pemilu/Pemilihan | Laporan KPU Kabupaten/Kota |

| | | | | | |
|----|--------------------|---|--|---|---|
| | | | Hanya sebagian kecil masyarakat yang peduli atas pelaksanaan pemilu dan pilkada tahun 2024 | Menurunnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada tahun 2024 | Tingkat Parmas Pemilihan 2020 di Masa Pandemi |
| 3 | Lingkungan | Daerah rawan bencana | Adanya ketakutan masyarakat untuk datang ke TPS | Berkurangnya partisipasi masyarakat pengguna hak pilih | Laporan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020 |
| | | Letak geografis | Keterlambatan distribusi logistik untuk daerah kepulauan | Tertundanya pelaksanaan pemungutan suara | Sda |
| | | Daerah padat penduduk | Gangguan kamtibmas | Terganggunya tahapan pemilihan | Sda |
| | | Penggunaan Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 | Akan semakin banyak pohon-pohon yang digunakan dalam logisitik pemilu dan pemilihan tahun 2024 | Potensi bencana alam dan menghambat Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 | Sda |
| 4 | Keuangan | Anggaran Pemilihan | Anggaran yang disetujui tidak sesuai dengan perencanaan kebutuhan | Pencermatan dan optimalisasi anggaran kegiatan | Sda |
| | | | Keterbatasan anggaran | Berkurangnya volume sejumlah kegiatan misalnya sosialisasi dan rakor dengan pihak stakeholder | Sda |
| | | Mekanisme Revisi Anggaran | Kebijakan yang sering berubah | tidak maksimalnya pelaksanaan tahapan | Sda |
| 5 | IT & Infrastruktur | Jaringan Internet | Gangguan jaringan | Terhambatnya Penerimaan dan pengiriman informasi | Sda |
| | | Keamanan Cyber | Terjadinya gangguan akses teknologi informasi | Terlambatnya penyampaian informasi ke masyarakat melalui jaringan IT | Materi Webinar Keamanan Cyber |
| | | | | | |
| II | INTERNAL | | | | |
| 1 | Strategik | Pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 | Belum ada kepastian jadwal, tahapan, program dan tahapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 | Dis-informasi terkait jadwal, program dan tahapan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024 | Perkembangan diskursus media |

| | | | | | |
|---|----------------------|--|--|--|--|
| 2 | Personil | kekurangan personil | Tidak meratanya distribusi pegawai di tiap-tiap sub bagian | Beban kerja bertambah, | Analisis SDM |
| | | Kemampuan atau Kompetensi Personil | Kompetensi tidak merata di semua bagian | Produktifitas pegawai menurun | Evaluasi SDM |
| | | Koordinasi dan Komunikasi antara Pimpinan dan Staf | Koordinasi tidak berjalan dengan baik | turunnya Kinerja Pegawai dan pelaksanaan kegiatan tidak maksimal | Hasil FGD internal |
| 3 | Proses | Kegiatan Tahapan dalam Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 | Perubahan tahapan, program dan Jadwal dalam Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 | Persiapan dan pelaksanaan yang kurang maksimal | Laporan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020 |
| | | | Regulasi Teknis terlambat ditetapkan | mengakibatkan Legitimasi suatu keputusan yang tidak efektif | Sda |
| | | | Tidak adanya Dasar Hukum Asuransi Badan aAdhoc | Anggaran Asuransi bagi badan Adhoc | Sda |
| 4 | IT dan Infrastruktur | Sarana dan Prasarana | keamanan server yang kurang memadai | Terhambatnya proses digitalisasi data | Materi Webinar Keamanan Cyber |
| 5 | Keuangan | Keterbatasan Anggaran Pemilu Tahun 2024 | Kurang maksimal dalam memfasilitasi pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2024 | Berpotensi terjadinya gugatan/sengketa Pemilu Tahun 2024 | Laporan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020 |
| | | | | Bisa mengganggu Partisipasi Masyarakat dalam memilih dalam Pemilu Tahun 2024 | Sda |
| 6 | Informasi | Media Sosial, media online | Kurangnya Informasi dan Pemberitaan terkait dengan Tahapan, Program dan Jadwal dalam Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 | Terhambatnya informasi ke masyarakat | Sda |
| | | Misinformasi, Hoaks | masih terjadinya misinformasi dan hoaks di media sosial dan Media Online | Masyarakat sering menerima informasi yang berbeda atau tidak sesuai fakta | Sda |

Keterangan:

1. Kolom (a) diisi nomor urut.
2. Kolom (b) diisi kategori risiko sesuai dengan risk taxonomy misalnya ; Ekonomi, Lingkungan Alam, Politik dan Sosial.
3. Kolom (c) diisi dengan topik risiko sesuai dengan risk taxonomy misalnya ; untuk kategori Sosial Politik adalah adanya peraturan-peraturan yang membatasi peran KPU.
4. Kolom (d) diisi uraian pernyataan potensial/nama risiko yang dapat terjadi sesuai dengan topik risiko yang ada di kolom (c).
5. Kolom (e) diisi uraian dampak berdasarkan potensial risiko pada kolom d
6. Kolom (f) diisi jika ada referensi yang digunakan dalam pengisian formulir

Ditetapkan di Manado

Pada tanggal 9 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

ARDILES M.R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan SDM



Carles Worotitjan

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 53 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO
DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL
AKTIVITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
UTARA TAHUN 2022

KRITERIA DAN SKALA YANG DIGUNAKAN DALAM PENILAIAN RISIKO

KRITERIA DAN SKALA YANG DIGUNAKAN DALAM PENILAIAN RISIKO

| A. KRITERIA DAN SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|--|---|---------------------------------|---|
| LEVEL/ SKALA | Kriteria Kemungkinan | Definisi Kriteria Kemungkinan | | | | |
| 1 | Sangat Kecil/Jarang | Mungkin terjadi hanya dalam kondisi tidak normal; Probabilitas 0-20% | | | | |
| 2 | Kemungkinan Kecil | Mungkin terjadi pada beberapa waktu; Probabilitas 21% - 40% | | | | |
| 3 | Kemungkinan Sedang/ Moderat | Dapat Terjadi pada beberapa waktu; Probabilitas 41% - 60% | | | | |
| 4 | Kemungkinan Besar | Akan mungkin terjadi pada banyak keadaan; Probabilitas 61%-80% | | | | |
| 5 | Hampir Pasti | Dapat terjadi pada banyak keadaan; Probabilitas 81%-100% | | | | |
| B. KRITERIA DAN SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO | | | | | | |
| LEVEL/ SKALA | Kriteria Dampak | ASPEK | | | | |
| | | Pencapaian Sasaran | Finansial | Kerusakan Lingkungan | Keselamat- an Kerja | Hukum |
| 1 | Tidak Signifikan | Tidak bedampak pada pencapaian sasaran secara umum | Tidak ada Kerugian financial | Polusi ringan/ Tidak ada dampak lingkungan | Tidak ada cidera | Tidak ada dampak hukum |
| 2 | Kecil | Mengganggu pencapaian sasaran meskipun tidak signifikan | Kerugian financial kecil | Polusi yang signifikan/ Dampak lingkungan Kecil | Perlu pertolongan pertama | Dampak hukum kecil (Sanksi peringatan) |
| 3 | Sedang | Mengganggu pencapaian sebagian sasaran secara signifikan | Kerugian financial sedang | Polusi yang serius/ Dampak lingkungan sedang | Perlu penanganan medis | Dampak Hukum Sedang (Peringata n Keras/ Pidana ringan) |
| 4 | Besar | Sebagian sasaran tidak tercapai | Kerugian financial besar | Kejadian lingkungan besar | Cidera yg meluas | Dampak hukum besar (Pemberh entian dari jabatan/ PSU/kuru ngan badan) |
| 5 | Sangat besar/Kata strofik | Seluruh sasaran tidak tercapai | Kerugian financial sangat besar | Kejadian lingkungan yang dahsyat/ Katastrofik | kematian | Dampak hukum sangat besar (Pemberh entian tetap/anca man pidana lebih dari 5 tahun) |

Kpt KPU No: 443 Tahun 2014 ttg Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU

| C. LEVEL RISIKO: HASIL PERKALIAN NILAI KEMUNGKINAN DAN DAMPAK | | | | |
|---|--------|--------------|---------|--|
| Range | Warna | Level Risiko | | Tindakan yang diambil |
| 13-25 | MERAH | 4 | Ekstrim | Diperlukan tindakan segera untuk mengelola risiko (<i>Unacceptable</i>) |
| 9-12 | ORANGE | 3 | Tinggi | Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko (<i>Issue</i>) |
| 6-8 | KUNING | 2 | sedang | Diambil tindakan jika tersedia sumberdaya (<i>Supliementary Issue</i>) |
| 1-5 | BIRU | 1 | rendah | Tidak diperlukan tindakan (<i>Acceptable</i>) |

Kriteria yang digunakan untuk menentukan batas antara risiko yang tidak dapat diterima dan dapat diterima adalah sebagai berikut:

| | | | | | |
|--|-----------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Kategori Kecelakaan (5) Besar (4) Sedang (3) Kecil (2) Tidak Signifikan (1) | 5 Acceptable | 10 Issues | 15 Unacceptable | 20 Unacceptable | 25 Unacceptable |
| | 4 Acceptable | 6 Supplementary issue | 12 Issues | 16 Unacceptable | 20 Unacceptable |
| | 3 Acceptable | 6 Supplementary issue | 9 Issues | 12 Issues | 15 Unacceptable |
| | 2 Acceptable | 4 Acceptable | 6 Supplementary issue | 8 Supplementary issue | 10 Issues |
| | 1 Acceptable | 2 Acceptable | 3 Acceptable | 4 Acceptable | 5 Acceptable |
| Jarang (1) | | Kemungkinan Kecil (2) | Kemungkinan Sedang (3) | Kemungkinan Besar (4) | Hampir Pasti (5) |
| Probabilitas/Likelihood | | | | | |

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 9 Mei 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

ARDILES M.R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan SDM



Charles Worotitjan

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 53 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO
DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL
AKTIVITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI UTARA TAHUN 2022

PENETAPAN TUJUAN LEVEL AKTIVITAS

PENETAPAN TUJUAN LEVEL AKTIVITAS

| | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|
| Unit Pemilik Risiko | | : Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Utara | | |
| Periode Penerapan | | : 2022 | | |
| No | Program/ Kegiatan | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Permasalahan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN | Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya | Persentase fasilitasi kerjasama KPU Provinsi dengan lembaga riset kepemiluan | Kegiatan kerjasama riset kepemiluan di tingkat KPU Provinsi belum terprogram |
| | | Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten | Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya | Kompetensi pegawai belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi penugasannya |
| | | Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi | Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik | Sarana dan prasarana kebutuhan kerja pegawai tidak semuanya berfungsi dengan baik |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi | Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota | Nilai akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota belum merata |
| | | | Persentase Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU Provinsi | Masih ada temuan berdasarkan LHP BPK terhadap LK maupun hasil audit kinerja |
| | | | Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi | Nilai evaluasi reformasi birokrasi masih belum sesuai harapan |
| | | Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan | Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu | Masih ada KPU Kabupaten/Kota yang tidak tepat waktu melaksanakan program pemutahiran data pemilih |
| 1.1. | Pelaksanaan Perencanaan Organisasi | Terwujudnya kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri | Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi | Tidak adanya kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi |
| | | Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi yang efektif dan efisien | Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan | Tidak terlaksananya revisi terhadap rencana kerja dan anggaran |
| | | Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien | Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu | Laporan monev program dan anggaran masih kurang akuntabel dan tidak tepat waktu |
| | | | Persentase target kinerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja | Masih ada komponen penilaian kinerja atau target kinerja yang tidak tercapai sesuai perjanjian kinerja |
| 1.2. | Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi | Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia | Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat | Masih adanya pegawai yang terlambat mendapatkan pelayanan kepegawaian dan layanan kepegawaian yang tidak akurat |
| | | | Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai | Penegakan disiplin pegawai tidak dilaksanakan |

| | | | | |
|------|--|---|--|---|
| | | Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel | Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel | Seleksi pegawai tidak terlaksana secara transparan dan akuntabel |
| | | | Persentase Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan | Seleksi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) belum sesuai Peraturan Perundang-Undangan |
| | | Terlaksananya Fasilitas Proses seleksi Anggota KPU Kabupaten/ Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku | Persentase Anggota KPU Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan | Seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota tidak sesuai dengan periode masa jabatan (terlambat) |
| | | | Persentase Fasilitas Jumlah Anggota KPU Kab/Kota yang dilakukan penggantian antarwaktu yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW | Proses PAW Anggota KPU Kab/Kota tidak sesuai dengan periode masa jabatan PAW |
| | | Tersedianya data dan informasi kepegawaian | Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi | Tidak semua pegawai datanya tercatat secara akurat dalam data base kepegawaian berbasis teknologi informasi |
| | | Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian | Jumlah Rancangan Kebijakan Bidang Kepegawaian | Tidak adanya rancangan kebijakan (SOP) di bidang kepegawaian |
| | | Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku | Persentase Pengisian Formasi Jabatan Fungsional Tata Kelola Pemilu (JF PKP) | Jabatan fungsional tata kelola pemilu tidak terisi |
| | | Pembentukan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc | Persentase badan adhoc yang dibentuk dan di evaluasi | Badan adhoc terlambat dibentuk |
| 1.3. | Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara | Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan | Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Provinsi | Pertanggungjawaban keuangan belum sesuai ketentuan |
| | | Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan | Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Provinsi | Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan tidak tepat waktu |
| | | Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid | Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran |
| | | Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku | Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku | BMN belum dikelola sesuai dengan perundang-undangan |
| 1.4. | Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip | Jumlah rancangan Keputusan KPU Provinsi tentang kearsipan yang telah disusun | Belum tersusunnya rancangan keputusan KPU Provinsi tentang kearsipan |

| | | | | |
|------|--|---|--|---|
| | Sarana Prasarana Kantor | | Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Provinsi | Arsip yang dikelola belum sesuai dengan jadwal retensi arsip (JRA) |
| | | Terwujudnya dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi | Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja satker KPU Provinsi yang berfungsi dengan baik | Sarana transportasi tidak berfungsi dengan baik untuk mendukung kinerja Satker KPU Provinsi |
| | | | Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Provinsi yang berfungsi dengan baik | Fasilitas kantor tidak berfungsi dengan baik |
| | | | Persentase Gedung dan Gudang KPU Provinsi yang berfungsi dengan baik | Gedung dan gudang KPU Provinsi tidak berfungsi dengan baik |
| | | Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol | Persentase Hasil Notulensi/Dokumentasi Rapat Pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Provinsi | Notulensi dan dokumentasi Rapat Pleno Rutin tidak diselesaikan tepat waktu |
| | | Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Provinsi | Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi yang dapat ditanggulangi | Gangguan keamanan tidak dapat ditanggulangi |
| 1.5. | Pemeriksaan dan Pengawasan Internal | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance) | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Provinsi | Pengaduan masyarakat tidak ditindaklanjuti |
| | | Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Provinsi | Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Provinsi | Rekomendasi BPK, BPKP dan APIP tidak ditindaklanjuti |
| | | | Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mengisi dan menyampaikan kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu | KPU Kabupaten/Kota tidak tepat waktu menyampaikan kartu kendali SPIP |
| | | Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Provinsi | Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) KPU Provinsi | Nilai akuntabilitas kinerja (SAKIP) tidak sesuai target peningkatan |
| 1.6. | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan | Peningkatan kompetensi SDM KPU Provinsi | Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM | Belum semua pegawai mengikuti diklat peningkatan kompetensi SDM |
| | | | Jumlah PNS KPU Provinsi yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal | PNS yang mengikuti program studi tata kelola pemilu dan program studi prioritas lainnya (IT, Akuntansi dan Hukum) tidak selesai sesuai jadwal |
| | | Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan | Jumlah kajian dalam rangka Reformasi Birokrasi | Tidak adanya kajian internal dalam rangka Reformasi Birokrasi |
| | | | Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan | Riset dan jurnal kepemiluan tidak ada |
| | | | | |

| No | Program/ Kegiatan | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Permasalahan |
|------|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| II | PROGRAM PENYELENGGA- RAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI | Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya | Persentase Rancangan Keputusan KPU Provinsi yang disusun dan ditetapkan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU | Keputusan KPU Provinsi disusun tidak tepat waktu sesuai SOP |
| | | Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan | Persentase Satker KPU Kabupaten/ Kota yang menyediakan logistik Pemilu/Pemilihan di TPS secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu | Satker KPU Kabupaten/Kota menyediakan logistik pemilu/pemilihan di TPS tidak tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu |
| | | Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal | Persentase penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal | Tahapan pemilu/pemilihan dilaksanakan tidak sesuai jadwal |
| 2.1. | Penyusunan Peraturan Perundang-undangan | Tersusunnya Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/ Kota sesuai dengan kerangka regulasi KPU | Persentase Keputusan KPU Provinsi yang disusun dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU | Keputusan KPU Provinsi disusun tidak sesuai dengan kerangka regulasi |
| | | Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum | Persentase produk hukum yang dikelola, didokumentasikan dan disajikan sesuai SOP | Produk hukum tidak dikelola, didokumentasikan dan disajikan sesuai SOP |
| 2.2. | Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum | Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum | Prosentase penurunan Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan di Bawaslu, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi yang dihadapi oleh KPU Provinsi | masih didapati adanya sengketa hukum |
| | | | Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi | Sengketa hukum tidak dimenangkan KPU Provinsi |
| 2.3. | Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal | Persentase Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU | Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan tidak sesuai dengan jadwal oleh KPU |
| | | | Persentase KPU kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024 | KPU Kabupaten/Kota belum memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu 2024 |
| | | Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan | Persentase proses PAW anggota DPRD Provinsi yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja | Proses PAW anggota DPRD Provinsi tidak dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja |
| | | Pengelolaan Calon Peserta Pemilu | Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi | Calon peserta Pemilu tidak dapat difasilitasi |

| | | | | |
|------|---|---|---|--|
| | | Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU | Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU | Tidak adanya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung tata Kelola KPU |
| | | Tersedianya pedoman atau petunjuk teknis verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan | Jumlah dokumen SOP, pedoman atau petunjuk teknis Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan | Tidak adanya dokumen SOP pedoman atau petunjuk teknis Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan |
| 2.4 | Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu | Jumlah/Terbentuknya Pusat Pendidikan Pemilih di KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota | KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak membentuk Pusat Pendidikan Pemilih |
| | | | Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP) | Rumah Pintar Pemilu tidak dilakukan digitalisasi |
| | | Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum | Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi | Tidak semua kegiatan pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk masyrakat umum yang terlaksana |
| | | Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat | Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP | Tidak semua permohonan informasi yang ditindaklanjuti PPID sesuai SOP |
| | | | Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Provinsi serta media massa. | tidak semua informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan dimuat di laman atau media sosial KPU Provinsi serta media massa. |
| | | | | |
| 2.5. | Pelaksanaan Pengelolaan Logistik | Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan | Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik | KPU Kabupaten/Kota mengalami permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik |
| | | | Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mengadakan logistik Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara | KPU Kabupaten/Kota yang Terdapat kasus oleh KPU Kabupaten/Kota dalam logistik Pemilu/Pemilihan yangmana kasus tersebut mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara |
| | | | Persentase KPU Kab/Kota yang mendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu | KPU Kab/Kota mendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan tidak tepat jenis, jumlah dan waktu |

| | | | | |
|-----|--|--|--|---|
| | | | Persentase KPU Kab/Kota yang memelihara dan menginventarisir logistik Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku | KPU Kab/Kota yang memelihara dan menginventarisir logistik Pemilu/ Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku |
| | | | Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melakukan penyusunan Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu | KPU Kabupaten/Kota tidak melakukan penyusunan Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu |
| | | Ketersediaan Logistik Pemilu | Persentase penyediaan logistik Pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu | Penyediaan logistik Pemilu tidak secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu |
| 2.6 | Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi | Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU | Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan | Program Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan belum Maksimal |
| | | | Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar | Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi tidak aman, handal dan lancar |
| | | | Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Provinsi | Aplikasi KPU belum terintegrasi di KPU Provinsi |

Ditetapkan di Manado

Pada tanggal 9 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

ARDILES M.R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan SDM



Carles Worotitjan

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 53 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO
DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL
AKTIVITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI UTARA TAHUN 2022

IDENTIFIKASI RISIKO/INDIKATOR RISIKO

IDENTIFIKASI RISIKO / INDIKATOR RISIKO

Unit Pemilik Risiko : **Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Utara**

Periode Penerapan : **2022**

| No | Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Risiko | | | Penyebab | | | Dampak | | Pengendalian Intern yang Ada | Sisa Risiko | Kriteria Risiko |
|----|---|--|--|--|---|----------|------|--------------------------------|--------------------|---|--|-----------------|
| | | Permasalahan | Pernyataan | Pemilik | Uraian | Sumber | C/UC | Uraian | Pihak yang Terkena | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Persentase fasilitasi kerjasama KPU Provinsi dengan lembaga riset kepemiluan | Kegiatan kerjasama riset kepemiluan di tingkat KPU Provinsi belum terprogram | Tidak adanya anggaran untuk program riset kepemiluan di tingkat KPU Provinsi | Kabag TPP Partisipasi, Hukum, Hupmas dan SDM/ Kasubag Hk dan SDM | Anggaran di masa Covid yang terbatas | internal | C | Sasaran kinerja tidak tercapai | KPU Provinsi Sulut | Melaksanakan riset mandiri serta membuka ruang kerjasama dengan lembaga lainnya | Tidak adanya anggaran untuk program riset kepemiluan di tingkat KPU Provinsi | Keuangan |
| 2 | Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya | Kompetensi pegawai belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi penugasannya | Pengetahuan terkait bidang penugasan masih belum merata | sda | Belum semua pegawai mengikuti Bimtek/Diklat terkait penugasannya, adanya perkembangan kebutuhan kompetensi teknis seiring dengan perkembangan teknologi informasi serta adanya mutasi ke bagian lainnya | internal | C | Kinerja pegawai tidak optimal | KPU Provinsi Sulut | Melaksanakan/ mengikutsertakan pegawai dalam Bimtek/Diklat teknis terkait bidang penugasannya | Pengetahuan terkait bidang penugasan masih belum merata | Operasional |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|----------|---|---|---------------------------------------|---|---|------------------------|
| 3 | Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik | Sarana dan prasarana kebutuhan kerja pegawai tidak semuanya berfungsi dengan baik | Pemeliharaan sarana dan prasarana kebutuhan kerja pegawai tidak konsisten dilakukan | Kabag KUL/Kasubag Umum | 1) Tidak adanya dokumen SOP mekanisme pemeliharaan sarana dan prasarana; 2) Keterbatasan anggaran | internal | C | Kinerja pegawai tidak optimal | KPU Provinsi Sulut | Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai laporan dan ketersediaan anggaran | Pemeliharaan sarana dan prasarana kebutuhan kerja pegawai tidak konsisten dilakukan | Operasional |
| 4 | Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota | Nilai akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota belum merata | Target kinerja dalam Renstra tidak dipahami secara menyeluruh, dan Perjanjian Kinerja hanya sekedar ditandatangani tanpa adanya evaluasi berkala terhadap upaya mencapai sasaran kinerja. | Kabag TPP Partisipasi, Hukum, Hupmas dan SDM/ Kasubag Hk dan SDM | Tidak adanya sosialisasi/Intern alisasi Renstra termasuk indikator-indikator kinerja baik Indikator Kinerja Utama (IKU) <i>Key Performance Indicator</i> maupun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | internal | C | Target kinerja tidak tercapai | KPU Provinsi Sulut dan Kabupaten/Kota | Melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kinerja | Target kinerja dalam Renstra tidak dipahami secara menyeluruh, dan Perjanjian Kinerja hanya sekedar ditandatangani tanpa adanya evaluasi berkala terhadap upaya mencapai sasaran kinerja. | strategis |
| 5 | Persentase Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU Provinsi | Masih ada temuan berdasarkan LHP BPK terhadap LK maupun hasil audit kinerja | Masih ada ketidakpatuhan terhadap mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan | Kabag KUL/Kasubag Keuangan | 1) Kesalahpahaman terhadap regulasi keuangan 2) Tidak adanya SOP pengelolaan keuangan 3) Kartu kendali keuangan belum terlalu detail | internal | C | Adanya Tuntutan Ganti Rugi dan sanksi administratif | KPU Provinsi Sulut | 1) Mengisi dan membahas kartu kendali 2) Koordinasi dan pendampingan APIP | Masih ada ketidakpatuhan terhadap mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan | Keuangan dan Kepatuhan |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|----------|---|--|--------------------|--|---|-----------|
| 6 | Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi | Nilai evaluasi reformasi birokrasi masih belum sesuai harapan | 8 area perubahan dan komponen penilaian dalam evaluasi Reformasi Birokrasi belum dilaksanakan secara konsisten dan merata | Kabag Rendatin/ Kasubag Perencanaan | Internalisasi, Perencanaan, Koordinasi dan Evaluasi pelaksanaan program reformasi birokrasi tidak berjalan secara kontinyu | internal | C | Rendahnya Pencapaian nilai evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | KPU Provinsi Sulut | 1) Membentuk Tim Reformasi Birokrasi 2) Sosialisasi RB kepada KPU Kabupaten/Kota | 8 area perubahan dan komponen penilaian dalam evaluasi Reformasi Birokrasi belum dilaksanakan secara konsisten dan merata | Kepatuhan |
| 7 | Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu | Masih ada KPU Kabupaten/Kota yang tidak tepat waktu melaksanakan program pemutakhiran data pemilih | Manajemen program tahapan pemutakhiran pemilih tidak berjalan dengan baik | Kabag Rendatin/Kasubag Data dan Informasi | 1) SDM PPDP, PPS dan PPK yang tidak melaksanakan tugas sesuai kerangka waktu; 2) Adanya masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh PPDP, PPS dan PPK | internal | C | Pelaksanaan tahapan tidak tepat waktu berpotensi adanya sanksi administratif dan etik | KPU Provinsi Sulut | 1) Bimtek Pemutakhiran Data Pemilih; 2) Koordinasi dengan pihak terkait | Manajemen program tahapan pemutakhiran pemilih tidak berjalan dengan baik | Kepatuhan |
| 8 | Jumlah Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi | Tidak adanya kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi | Inisiatif kerjasama dengan instansi terkait rendah | Kabag Rendatin/Kasubag Perencanaan | Tidak dilakukan inventarisasi dan pemetaan terhadap instansi mana saja yang perlu dilakukan kerjasama | internal | C | KPU Provinsi dianggap eksklusif dan program penguatan kelembagaan tidak berjalan dengan baik | KPU Provinsi Sulut | 1) MoU/PKS dengan instansi terkait meskipun masih terbatas | Inisiatif kerjasama dengan instansi terkait rendah | Reputasi |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|-----|--|----------|---|---|-------------------------------|---|--|-----------|
| 9 | Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan | Tidak terlaksananya revisi terhadap rencana kerja dan anggaran | Satker hanya berharap revisi tingkat eselon I/KPU RI dan tidak memaksimalkan kewenangan revisi oleh Satker/KPA | sda | Tidak dilakukan evaluasi terhadap realisasi anggaran dan kebutuhan anggaran untuk kinerja kegiatan lainnya | internal | C | Kinerja kegiatan tidak didukung dengan anggaran; Penyerapan anggaran lemah | KPU Provinsi Sulut | Revisi anggaran | Satker hanya berharap revisi tingkat eselon I/KPU RI dan tidak memaksimalkan kewenangan revisi oleh Satker/KPA | keuangan |
| 10 | Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu | Laporan monev program dan anggaran masih kurang akuntabel dan tidak tepat waktu | KPU Kabupaten Kota belum konsisten menyusun dan melaporkan laporan monev program dan anggaran | sda | Tidak diprogramkannya pelaporan monev program anggaran dalam RPR sehingga mekanisme kontrol atau mengingatkan terkait waktu pelaporan tidak berjalan | internal | C | Evaluasi pencapaian sasaran program dan anggaran tidak terlaksana secara menyeluruh | KPU Provinsi Sulut dan KPU RI | KPU Provinsi mengingatkan KPU Kabupaten/Kota tentang jadwal penyampaian laporan | KPU Kabupaten Kota belum konsisten menyusun dan melaporkan laporan monev program dan anggaran | Keuangan |
| 11 | Persentase target kinerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja | Masih ada komponen penilaian kinerja atau target kinerja yang tidak tercapai sesuai perjanjian kinerja | Sasaran kinerja tidak tersosialisasi dengan baik sehingga kegiatan untuk mencapai indikator kinerja yang ditetapkan tidak maksimal | sda | Tidak adanya sosialisasi dan pembahasan sasaran kinerja dan perjanjian kinerja serta evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja | internal | C | Target kinerja tidak tercapai | KPU Provinsi dan KPU RI | Menyusun Perjanjian Kinerja | Sasaran kinerja tidak tersosialisasi dengan baik sehingga kegiatan untuk mencapai indikator kinerja yang ditetapkan tidak maksimal | Kebijakan |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|---|--|----------|---|--|----------------------------------|--|--|---------------------|
| 12 | Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat | Masih adanya pegawai yang terlambat mendapatkan pelayanan kepegawaian dan layanan kepegawaian yang tidak akurat | Pelayanan kepegawaian tidak sesuai mekanisme dan standar layanan | Kabag TPP, Partisipasi, Hukum, Humas dan SDM/ Kasubag Hukum dan SDM | Tidak adanya SOP pelayanan kepegawaian yang menjadi panduan pelayanan kepegawaian tepat waktu dan akurat | internal | C | Pelayanan kepegawaian terlambat dan tidak akurat | Pegawai sekretariat KPU Provinsi | Kartu kendali kepegawaian | Pelayanan kepegawaian tidak sesuai mekanisme dan standar layanan | Operasional |
| 13 | Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai | Penegakan disiplin pegawai tidak dilaksanakan | Mekanisme pengawasan disiplin pegawai tidak berjalan | sda | 1) Tidak adanya SOP pengawasan dan evaluasi kepatuhan pegawai terhadap ketentuan tentang disiplin pegawai. 2) Kartu kendali rekapitulasi kehadiran pegawai tidak dibahas dan diakumulasi setiap pertambahan bulan dalam setahun masa kerja. 3) Peraturan tentang disiplin pegawai belum dipahami dengan baik | internal | C | 1) Inkonsistensi penegakan disiplin pegawai; 2) Pelanggaran disiplin pegawai tidak ditangani sejak level pelanggaran ringan (nanti teridentifikasi ketika level hukdis telah meningkat pada hukdis sedang atau berat | Sekretariat KPU Provinsi Sulut | Kartu kendali rekapitulasi kehadiran pegawai bulanan | Mekanisme pengawasan disiplin pegawai tidak berjalan | Kepatuhan dan Hukum |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|-----|---|----------|---|--|-----------------------------------|--|---|---------------------|
| 14 | Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel | Seleksi pegawai tidak terlaksana secara transparan dan akuntabel | Mekanisme masih kurang transparan | sda | Tidak dilaksanakan internalisasi peraturan seleksi | internal | C | pelaksanaan seleksi tidak transparan dan rentan protes | Sekretariat KPU Provinsi Sulut | Rapat persiapan seleksi | Mekanisme masih kurang transparan | Operasional |
| 15 | Persentase Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan | Seleksi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) belum sesuai Peraturan Perundang-Undangan | Peraturan tentang seleksi PPNPN belum dipahami secara utuh | sda | Tidak dilaksanakan internalisasi peraturan seleksi PPPK dan tidak dibuatkan SOP | internal | C | pelaksanaan seleksi tidak sesuai peraturan | Sekretariat KPU Provinsi Sulut | Pencetakan peraturan seleksi PPPK | Peraturan tentang seleksi PPNPN belum dipahami secara utuh | Hukum |
| 16 | Persentase Anggota KPU Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan | Seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota tidak sesuai dengan periode masa jabatan (terlambat) | Tahapan seleksi tidak dilaksanakan dengan konsisten | sda | Perencanaan kegiatan seleksi tidak akurat. Dukungan administrasi terhadap Timsel tidak maksimal | internal | C | Fasilitasi seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota terhambat | Timsel, Sekretaris Timsel, KPU RI | Bimtek dan Rakor Timsel dengan sekretariat | Tahapan seleksi tidak dilaksanakan dengan konsisten | Hukum dan Kepatuhan |
| 17 | Persentase Fasilitasi Jumlah Anggota KPU Kab/Kota yang dilakukan penggantian antarwaktu yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW | Proses PAW Anggota KPU Kab/Kota tidak sesuai dengan periode masa jabatan PAW | Adanya masalah pada calon pengganti antar waktu yang tidak diselesaikan dengan segera | sda | Kewenangan PAW berada di KPU RI; Tidak adanya standar waktu proses PAW | internal | C | Kekosongan posisi satu atau lebih komisioner yang berdampak pada kinerja lembaga | KPU, KPU Prov dan Kab/Kota ybs | Koordinasi dengan Biro SDM | Adanya masalah pada calon pengganti antar waktu yang tidak diselesaikan dengan segera | Hukum dan Kepatuhan |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|-----|--|----------|---|---|-------------------------------------|--|---|---------------------------|
| 18 | Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi | Tidak semua pegawai datanya tercatat secara akurat dalam data base kepegawaian berbasis teknologi informasi | Operator tidak mengupdate Data Kepegawaian secara berkala | sda | Kurang Pengawasan dari Kasubbag SDM ke Operator, Beban Kerja Operator Berlebihan, Tidak ada SOP yang jelas | Internal | C | Pelayanan Kepegawaian terhambat (Rekap Data, Kenpa) | PNS | Ada Kartu Kendali Kepegawaian | Operator tidak mengupdate Data Kepegawaian secara berkala | Kepatuhan dan Operasional |
| 19 | Jumlah Rancangan Kebijakan Bidang Kepegawaian | Tidak adanya rancangan kebijakan (SOP) di bidang kepegawaian | tidak adanya SOP di Bidang Kepegawaian yang menjadi panduan pelayanan kepegawaian yang tepat dan akurat | sda | belum ada Rancangan kebijakan SOP sehingga tidak berjalan dengan baik | Internal | C | Pelayanan Kepegawaian belum berjalan dengan baik | Pegawai Sekretariat KPU Prov. Sulut | Kartu Kendali Kepegawaian | tidak adanya SOP di Bidang Kepegawaian yang menjadi panduan pelayanan kepegawaian yang tepat dan akurat | Operasional |
| 20 | Persentase Pengisian Formasi Jabatan Fungsional Tata Kelola Pemilu (JF PKP) | Jabatan fungsional tata kelola pemilu tidak terisi | belum dilaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Fungsional Tata Kelola Pemilu | sda | Implementasi di KPU Provinsi masih menunggu petunjuk KPU RI | internal | C | Target kinerja tidak tercapai | Pegawai Sekretariat KPU Prov. Sulut | Mengikuti Surat Edaran dan Dinas dari KPU RI | belum dilaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Fungsional Tata Kelola Pemilu | Operasional |
| 21 | Persentase badan adhoc yang dibentuk dan di evaluasi | Badan adhoc terlambat dibentuk | Tahapan Badan adhoc oleh KPU Kab/Kota terhambat | sda | KPU Kabupaten/Kota tidak memahami alur tahapan dan perencanaannya tidak detail | Internal | C | Pemilu Serentak belum bisa dilaksanakan dengan baik karena belum terbentuknya badan adhoc | KPU Kabupaten/Kota | Melaksanakan Bimtek Rekrutmen Badan Ad Hoc | Tahapan Badan adhoc oleh KPU Kab/Kota terhambat | Kepatuhan |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|-------------------------------------|--|----------|---|---|-----------------------------------|--|--|---------------------|
| 22 | Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Provinsi | Pertanggungjawaban keuangan belum sesuai ketentuan | Kurang dipahaminya peraturan pengelolaan anggaran | Pengelola Keuangan | Peraturan cepat berubah dan tidak ada waktu melakukan pembahasan pengelolaan keuangan sesuai peraturan yang baru | internal | C | Adanya temuan hasil audit | KPU Provinsi | Bimtek Pengelolaan Keuangan | Kurang dipahaminya peraturan pengelolaan anggaran | Kepatuhan dan Hukum |
| 23 | Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Provinsi | Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan tidak tepat waktu | Keterlambatan penginputan data LPPA | Kabag KUL/Kasubag Keuangan | Data dukung terlambat dikumpul | internal | C | Nilai akuntabilitas pengelolaan keuangan berkurang | Sekretariat KPU Provinsi Sulut | Melakukan monitoring kepada KPU Kabupaten Kota | Keterlambatan penginputan data LPPA | Kepatuhan |
| 24 | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid | Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran | Keterlambatan penginputan data | Kabag KUL/Kasubag Keuangan | Data dukung terlambat dikumpul | internal | C | Nilai akuntabilitas pengelolaan keuangan berkurang | Sekretariat KPU Provinsi Sulut | Melakukan monitoring kepada KPU Kabupaten Kota | Keterlambatan penginputan data | Kepatuhan |
| 25 | Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku | BMN belum dikelola sesuai dengan perundang-undangan | Belum adanya Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara KPU Provinsi Sulawesi Utara | Kabag KUL/Kasubag Umum dan Logistik | Proses Verifikasi atas Pengusulan Penetapan Status Penggunaan BMN oleh KPU yang cukup lama | Internal | C | Proses Penghapusan BMN yang Rusak/Hilang/tidak ditemukan, kurang maksimal | KPU Provinsi / KPU Kabupaten/Kota | Melakukan Identifikasi BMN dan mengusulkan kembali Penetapan Status Penggunaan BMN ke KPU RI | Belum adanya Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara KPU Provinsi Sulawesi Utara | Operasional |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|--------------------------------------|--|----------|---|--|---|--|--|-------------|
| 26 | Jumlah rancangan Keputusan KPU Provinsi tentang kearsipan yang telah disusun | Belum tersusunnya rancangan keputusan KPU Provinsi tentang kearsipan | Pemahaman terhadap PKPU Kearsipan sebagai acuan untuk menyusun Keputusan tentang kearsipan masih kurang | Kabag KUL/ Kasubag Umum dan Logistik | PKPU tentang pengelolaan arsip belum terinternalisasi | internal | C | Tidak ada acuan hukum yang lebih detail dan spesifik tentang pengelolaan arsip | Sekretariat KPU Provinsi Sulut | Penggandaan dan distribusi peraturan KPU | Pemahaman terhadap PKPU Kearsipan sebagai acuan untuk menyusun Keputusan tentang kearsipan masih kurang | hukum |
| 27 | Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Provinsi | Arsip yang dikelola belum sesuai dengan jadwal retensi arsip (JRA) | Belum adanya pengklasifikasian arsip | Kabag KUL/ Kasubag Umum dan Logistik | Terbatasnya SDM serta belum adanya tenaga Arsiparis | Internal | C | Terhambatnya akses informasi kearsipan | KPU Provinsi / KPU Kabupaten/Kota | Membuat SOP pengelolaan arsip | Belum adanya pengklasifikasian arsip | Operasional |
| 28 | Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja satker KPU Provinsi yang berfungsi dengan baik | Sarana transportasi tidak berfungsi dengan baik untuk mendukung kinerja Satker KPU Provinsi | Sarana transportasi masih kurang, sementara itu beberapa sarana transportasi tidak berfungsi dengan baik | Kabag KUL/ Kasubag Umum dan Logistik | Alokasi Anggaran Masih Kurang | internal | C | Terhambatnya pelaksanaan program dan kegiatan | KPU Provinsi / KPU Kabupaten/Kota | Inventarisir Aset BMN berupa Kendaraan | Sarana transportasi masih kurang, sementara itu beberapa sarana transportasi tidak berfungsi dengan baik | Operasional |
| 29 | Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Provinsi yang berfungsi dengan baik | Fasilitas kantor tidak berfungsi dengan baik | Terjadinya kerusakan fasilitas perkantoran | Kabag KUL/ Kasubag Umum dan Logistik | Alokasi anggaran serta belum adanya kepemilikan tanah dan bangunan sendiri | internal | C | Terhambatnya pelayanan internal dan eksternal | KPU Provinsi / KPU Kabupaten/Kota dan Pihak Eksternal | melakukan perawatan fasilitas secara rutin | Terjadinya kerusakan fasilitas perkantoran | Operasional |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|---|--|----------------------|---|---|--|---|---|-------------|
| 30 | Persentase Gedung dan Gudang KPU Provinsi yang berfungsi dengan baik | Gedung dan gudang KPU Provinsi tidak berfungsi dengan baik | Terjadinya kerusakan bagian gedung. Gudang masih dalam status sewa | Kabag KUL/ Kasubag Umum dan Logistik | Status kepemilikan Gedung dan Gudang yang masih di sewa/pinjam | internal | C | Operasional yang kurang efektif akibat keterbatasan sarana dan prasarana | KPU Provinsi / KPU Kabupaten/Kota dan Pihak Eksternal | pemeliharaan gedung dan gudang | Terjadinya kerusakan bagian gedung. Gudang masih dalam status sewa | Operasional |
| 31 | Persentase Hasil Notulensi/Dokumentasi Rapat Pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Provinsi | Notulensi dan dokumentasi Rapat Pleno Rutin tidak diselesaikan tepat waktu | Tidak adanya staf yang ditugaskan untuk mencatat notula dan mendokumentasikan RPR | Kabag KUL/ Kasubag Umum dan Logistik | Staf belum belum terlatih membuat notulensi | internal | C | Administrasi rapat tidak lengkap dan dapat menjadi kendala ketika ada gugatan | Sekretariat KPU Provinsi Sulut | memberikan contoh notulensi | Tidak adanya staf yang ditugaskan untuk mencatat notula dan mendokumentasikan RPR | operasional |
| 32 | Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi yang dapat ditanggulangi | Gangguan keamanan tidak dapat ditanggulangi | Kurangnya koordinasi dan antisipasi gangguan keamanan Tahapan Pemilu/ Pemilihan | Kabag KUL/ Kasubag Umum dan Logistik | Tidak adanya identifikasi potensi gangguan keamanan | Eksternal / Internal | C | Terhambatnya tahapan Pemilu/Pemilihan | KPU Provinsi / KPU Kabupaten/Kota dan Pihak Peserta Pemilu/ Masyarakat | Sosialisasi dan koordinasi dengan pihak terkait | Kurangnya koordinasi dan antisipasi gangguan keamanan Tahapan Pemilu/ Pemilihan | Operasional |
| 33 | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Provinsi | Pengaduan masyarakat tidak ditindaklanjuti | Penanganan Pengaduan tidak berjalan dengan baik | Kabag TPP, Partisipasi, Hukum, Humas dan SDM/ Kasubag Hukum dan SDM | SDM kurang memahami SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat | internal | C | Kurangnya kepercayaan dari Masyarakat | KPU Provinsi Sulut | Sosialisasi, Pelatihan untuk SDM | Penanganan Pengaduan tidak berjalan dengan baik | Operasional |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|---------------------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|-------------------------|
| 34 | Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Provinsi | Rekomendasi BPK, BPKP dan APIP tidak ditindaklanjuti | Tidak Berjalannya tindak lanjut Rekomendasi BPK dan APIP | Kabag KU /Kasub KU | Kurangnya Kesadaran dan rasa tanggung jawab atas rekomendasi yang akan ditindak lanjuti | internal | C | Tidak terselesaikannya BPK, BPKP, dan APIP | KPU Provinsi Sulawesi Utara | Pemberian Sanksi | Tidak Berjalannya tindak lanjut Rekomendasi BPK dan APIP | Keuangan |
| 35 | Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mengisi dan menyampaikan kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu | KPU Kabupaten/Kota tidak tepat waktu menyampaikan kartu kendali SPIP | 1) belum optimal dalam pelaksanaan SPIP di satker. 2) Operator terlambat mengupdate Data | Kabag TPPPHMHS/ Kasubag Hukum dan SDM | Kurangnya Pengawasan terhadap pelaksanaan SPIP | internal | C | Terhambatnya tujuan SPIP | KPU Provinsi Sulut, KPU Kabupaten/Kota | KPU Provinsi mengingatkan KPU Kabupaten/Kota untuk menyampaikan Kartu Kendali SPIP sesuai Jadwal | 1) belum optimal dalam pelaksanaan SPIP di satker. 2) Operator terlambat mengupdate Data | operasional, Keuangan |
| 36 | Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) KPU Provinsi | Nilai akuntabilitas kinerja (SAKIP) tidak sesuai target peningkatan | Tidak dilakukan evaluasi secara berkala terhadap capaian indikator kinerja | Kabag Rendatin/ Kasubag Perencanaan | Evaluasi rutin terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja tidak teragendakan | internal | C | Tidak ada pemantauan progres capaian nilai akuntabilitas kinerja | KPU Provinsi Sulut | Pengumpulan kartu kendali SAKIP | Tidak dilakukan evaluasi secara berkala terhadap capaian indikator kinerja | Kebijakan dan kepatuhan |
| 37 | Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM | Belum semua pegawai mengikuti diklat peningkatan kompetensi SDM | Tidak ada identifikasi kebutuhan kompetensi SDM dan program serta anggaran peningkatan kompetensi terbatas | Kabag TPPPHMHS/ Kasubag Hukum dan SDM | Program Peningkatan Kompetensi SDM bergantung pada program KPU RI | internal | C | Kinerja SDM tidak maksimal sebagaimana yang diharapkan | Sekretariat KPU Provinsi Sulut | Diklat dan Bimtek | Tidak ada identifikasi kebutuhan kompetensi SDM dan program serta anggaran peningkatan kompetensi terbatas | Operasional |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|---------------------------------------|---|----------|---|---|--------------------------------|---|--|------------------------|
| 38 | Jumlah PNS KPU Provinsi yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal | PNS yang mengikuti program studi tata kelola pemilu dan program studi prioritas lainnya (IT, Akuntansi dan Hukum) tidak selesai sesuai jadwal | PNS tidak fokus pada penyelesaian studi. Konsentrasinya terpecah dengan perhatian terhadap kerja, apalagi disaat tahapan | Kabag TPPPHMHS/ Kasubag Hukum dan SDM | Jadwal tahapan pemilu/ pemilihan yang padat | internal | C | Keterlambatan lulus dan TGR | Sekretariat KPU Provinsi Sulut | Monitoring dan pelaporan studi | PNS tidak fokus pada penyelesaian studi. Konsentrasinya terpecah dengan perhatian terhadap kerja, apalagi disaat tahapan | Operasional |
| 39 | Jumlah kajian dalam rangka Reformasi Birokrasi | Tidak adanya kajian internal dalam rangka Reformasi Birokrasi | Rencana aksi reformasi birokrasi tidak tersusun dengan baik | Kabag Rendatin/ Kasubag Perencanaan | Tugas Tim Reformasi Birokrasi kurang dipahami | Internal | C | Kajian yang minim menyebabkan tujuan reformasi birokrasi tidak tercapai dengan baik | Sekretariat KPU Provinsi Sulut | Pembentukan Tim RB dan rapat tim | Rencana aksi reformasi birokrasi tidak tersusun dengan baik | operasional |
| 40 | Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan | Riset dan jurnal kepemiluan tidak ada | Tidak tertata anggaran untuk pelaksanaan riset dan penerbitan jurnal kepemiluan | Kabag Rendatin/ Kasubag Perencanaan | Keterbatasan anggaran | internal | C | Tidak adanya riset kepemiluan secara mandiri dan publikasi melalui jurnal | Sekretariat KPU Provinsi Sulut | Menstimulus kerjasama riset dan penulisan di jurnal KPU RI dan jurnal lainnta | Tidak tertata anggaran untuk pelaksanaan riset dan penerbitan jurnal kepemiluan | Keuangan dan Kebijakan |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|---|---|----------|---|---|-----------------------------------|---|--|---------------------|
| 41 | Persentase Rancangan Keputusan KPU Provinsi yang disusun dan ditetapkan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU | Keputusan KPU Provinsi disusun tidak tepat waktu sesuai SOP | SOP belum berjalan dengan baik | Kabag TPP, Partisipasi, Hukum, Humas dan SDM/ Kasubag Hukum dan SDM | SDM kurang memahami SOP | internal | C | Tahapan terganggu, | KPU Provinsi | Sosialisasi SOP | SOP belum berjalan dengan baik | Operasional, hukum |
| 42 | Persentase Satker KPU Kabupaten/ Kota yang menyediakan logistik Pemilu/Pemilihan di TPS secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu | Satker KPU Kabupaten/Kota menyediakan logistik pemilu/pemilihan di TPS tidak tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu | Prinsip - prinsip pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan belum maksimal | Kabag KUL/Kasubag Umum dan Logistik | Regulasi Pengelolaan Logistik kurang relevan dengan kondisi lapangan | internal | C | Pengelolaan Logistik tidak sesuai jadwal | KPU Provinsi / KPU Kabupaten/Kota | Sosialisasi dan koordinasi tingkat satker | Prinsip - prinsip pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan belum maksimal | Operasional |
| 43 | Persentase penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal | Tahapan pemilu/pemilihan dilaksanakan tidak sesuai jadwal | Adanya hambatan terhadap pelaksanaan tahapan | Semua Kabag | Tidak ada identifikasi faktor yang berpotensi menghambat pelaksanaan tahapan, sehingga tidak ada langkah antisipasi | internal | C | Tahapan tidak sesuai jadwal dapat menyebabkan masalah hukum | KPU Provinsi | Rapat Koordinasi setiap Tahapan | Adanya hambatan terhadap pelaksanaan tahapan | Hukum dan kepatuhan |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|----------------|---|----------|---|---|-------------------------------------|---|--|---------------------|
| 44 | Persentase Keputusan KPU Provinsi yang disusun dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU | Keputusan KPU Provinsi disusun tidak sesuai dengan kerangka regulasi | produk hukum yang dihasilkan belum sesuai | Kabag TPPPHMHS | SDM kurang memahami penyusunan produk hukum | internal | C | Mutu Produk Hukum kurang baik | KPU Provinsi | Sosialisasi SOP Penyusunan produk hukum ke semua bagian | produk hukum yang dihasilkan belum sesuai | Hukum dan kepatuhan |
| 45 | Persentase produk hukum yang dikelola, didokumentasikan dan disajikan sesuai SOP | Produk hukum tidak dikelola, didokumentasikan dan disajikan sesuai SOP | SOP Pengunggahan produk hukum tidak disosialisasikan | Kabag TPPPHMHS | kurangnya koordinasi antar bagian dalam penyajian Produk Hukum | internal | C | terlambat publikasi tentang Produk Hukum | KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota | Koordinasi antar bagian | SOP Pengunggahan produk hukum tidak disosialisasikan | Hukum dan kepatuhan |
| 46 | Prosentase penurunan Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan di Bawaslu, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi yang dihadapi oleh KPU Provinsi | masih didapati adanya sengketa hukum | Adanya perbedaan pemahaman antara penyelenggara dan peserta pemilu | Kabag TPPPHMHS | Penyelenggara Pemilu kurang memahami Tupoksi | Internal | C | menghambat tahapan, sanksi terhadap penyelenggara | KPU Provinsi | Bimtek, Koordinasi dioptimalkan | Adanya perbedaan pemahaman antara penyelenggara dan peserta pemilu | Hukum |
| 47 | Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi | Sengketa hukum tidak dimenangkan KPU Provinsi | penanganan sengketa belum maksimal | Kabag TPPPHMHS | Kurang pemahaman terkait penanganan sengketa, kurang koordinasi | internal | C | Tahapan terhambat, sanksi terhadap Penyelenggara | KPU Provinsi | Bimtek dan Rakor Penyelenggara Pemilu, koordinasi yang baik | penanganan sengketa belum maksimal | Hukum |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|---|---|----------|---|---|---|--|---|---------------------------|
| 48 | Persentase Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU | Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan tidak sesuai dengan jadwal oleh KPU | Jadwal tahapan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertentangan dengan jadwal oleh KPU | Kabag TPPPHMHS/ Kasub Bag Teknis dan Hupmas | Jadwal yang ditetapkan oleh KPU terlambat sehingga tidak ada ruang untuk dilakukannya konsultasi, koordinasi dan supervisi serta bimtek secara berjenjang | Internal | C | Pemilu/Pemilihan tidak terlaksana sesuai aturan | KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersangkutan | Melakukan Konsultasi, Koordinasi, Supervisi dan Bimtek secara berjenjang | Jadwal tahapan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertentangan dengan jadwal oleh KPU | Strategis |
| 49 | Persentase KPU kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024 | KPU Kabupaten/Kota belum memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu 2024 | Adanya penetapan Daerah Pemilihan yang tidak akurat | Kabag TPPPHMHS/ Kasub Bag Teknis dan Hupmas | KPU Kabupaten/Kota tidak berkoordinasi dengan pemangku kepentingan yang membidangi data pemekaran wilayah administrasi daerah | Internal | C | Daerah pemilihan tidak merepresentasikan keterwakilan pemilih | KPU Kabupaten/Kota bersangkutan dengan peserta Pemilu | Melakukan pemutakhiran data wilayah dan berkoordinasi berkala secara intensif dengan pemerintah daerah terkait data pemekaran wilayah administrasi baru. | Adanya penetapan Daerah Pemilihan yang tidak akurat | Operasional dan Hukum |
| 50 | Persentase proses PAW anggota DPRD Provinsi yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja | Proses PAW anggota DPRD Provinsi tidak dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja | PAW dilakukan lebih dari 5 hari | Kabag TPPPHMHS/ Kasub Bag Teknis dan Hupmas | Para pegawai yang membidangi tugas tidak menjalankan sesuai SOP | Internal | C | PAW dilaksanakan tidak sesuai petunjuk teknis | KPU Provinsi dan Calon PAW | Melakukan langkah koordinatif terjadwal segera setelah menerima Surat dari DPRD Provinsi | PAW dilakukan lebih dari 5 hari | Operasional dan Kepatuhan |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|---|--|----------|---|---|---------------------------------------|--|--|---------------------------|
| 51 | Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi | Calon peserta Pemilu tidak dapat difasilitasi | Layanan terhadap Calon Peserta Pemilu tidak memuaskan | Kabag TPPPHMHS/ Kasub Bag Teknis dan Hupmas | Para pihak yang diberi tugas tidak menjalankan sesuai SOP | Internal | C | Adanya calon peserta pemilu yang mengajukan gugatan | KPU Provinsi dan Calon Peserta Pemilu | Menempatkan SDM yang berintegritas melalui bimtek berkala | Layanan terhadap Calon Peserta Pemilu tidak memuaskan | Operasional dan Kepatuhan |
| 52 | Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU | Tidak adanya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung tata Kelola KPU | Pekerjaan penyusunan pedoman/desain/template dilaksanakan tidak terprogram dan terpola | Kabag TPPPHMHS/ Kasub Bag Teknis dan Hupmas | Para pihak tidak melakukan analisa kebutuhan Pemilu di setiap tahapannya | Internal | C | Hasil kerja di setiap tahapan tidak terukur | KPU Provinsi | Melakukan analisa kebutuhan pada setiap tahapan | Pekerjaan penyusunan pedoman/desain/template dilaksanakan tidak terprogram dan terpola | Operasional |
| 53 | Jumlah dokumen SOP, pedoman atau petunjuk teknis Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan | Tidak adanya dokumen SOP pedoman atau petunjuk teknis Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan | KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota hanya berpedoman pada PKPU dan Juknis KPU RI | Kabag TPPPHMHS/ Kasub Bag Teknis dan Hupmas | Ditetapkannya PKPU dan Juknis yang terlambat atau berdekatan dengan dimualainya setiap tahapan | Internal | C | Pelaksanaan tahapan tidak optimal | KPU Provinsi dan Calon Peserta Pemilu | Melakukan berbagai analisis dan simulasi untuk pelaksanaan tahapan | KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota hanya berpedoman pada PKPU dan Juknis KPU RI | Operasional |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|---|--|----------|---|---|--------------|--|---|--------------------------|
| 54 | Jumlah/Terbentuknya Pusat Pendidikan Pemilih di KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota | KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak membentuk Pusat Pendidikan Pemilih | Pusat Pendidikan Pemilih tidak terprogramkan | Kabag TPPPHMHS/ Kasub Bag Teknis dan Hupmas | Tidak tertata anggaran dalam DIPA | internal | C | Kegiatan Pendidikan Pemilih tidak sistematis | KPU Provinsi | Mengoptimalkan Rumah Pintar Pemilu dan Kegiatan pendidikan pemilih lainnya | Pusat Pendidikan Pemilih tidak terprogramkan | Operasional |
| 55 | Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP) | Rumah Pintar Pemilu tidak dilakukan digitalisasi | Tidak terfasilitasi dengan anggaran | sda | Satker di KPU Sulut belum masuk dalam daerah percontohan di digitalisasi RPP | Internal | C | RPP belum menyesuaikan dengan perkembangan era digital | KPU Provinsi | Mengajukan permohonan ke KPU RI | Tidak terfasilitasi dengan anggaran | operasional dan keuangan |
| 56 | Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi | Tidak semua kegiatan pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk masyarakat umum yang terlaksana | target volume kegiatan tidak didukung dengan anggaran | sda | Anggaran di masa pandemi Covid yang terbatas | internal | C | Target kegiatan tidak tercapai | KPU Provinsi | Mengoptimalkan pendidikan pemilih secara daring dan revisi anggaran | target volume kegiatan tidak didukung dengan anggaran | operasional dan keuangan |
| 57 | Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP | Tidak semua permohonan informasi yang ditindaklanjuti PPID sesuai SOP | SOP belum tersusun dan dipahami personil PPID yang baru | sda | Tidak dilakukan internalisasi/ sosialisasi SOP | internal | C | Adanya sengketa informasi publik yang bisa menurunkan nilai indeks keterbukaan informasi publik | KPU Provinsi | Rapat evaluasi PPID | SOP belum tersusun dan dipahami personil PPID yang baru | operasional |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|-------------------------------------|--|----------|---|--|---------------------------|--|---|----------|
| 58 | Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/ Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Provinsi serta media massa. | tidak semua informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan an dimuat di laman atau media sosial KPU Provinsi serta media massa. | Kompetensi SDM Bakohumas masih belum sesuai dengan harapan dan kegiatan publikasi di laman/ medsos belum sistematis | sda | Belum ada bimtek/training kepada personil Bakohumas serta belum disusunnya jadwal publikasi laman dan medsos | internal | C | Citra KPU yang transparan di hadapan publik akan melemah | KPU Provinsi | Rapat Bakohumas | Kompetensi SDM Bakohumas masih belum sesuai dengan harapan dan kegiatan publikasi di laman/ medsos belum sistematis | Reputasi |
| 59 | Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik | KPU Kabupaten/Kota mengalami permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik | Kekurangan anggaran pengadaan logistik | Kabag KUL/Kasubag Umum dan Logistik | Regulasi Pengadaan dan Pengelolaan logistik yang berpengaruh pada perencanaan kebutuhan dan pengadaan logistik | internal | C | Dampak hukum terkait permasalahan anggaran | KPU Provinsi dan Kab/Kota | Koordinasi di setiap Tingkat Penyelenggara | Kekurangan anggaran pengadaan logistik | Keuangan |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|-------------------------------------|--|-----------|---|---|---|--|--|-------------|
| 60 | Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mengadakan logistik Pemilu/ Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara | KPU Kabupaten/ Kota yang Terdapat kasus oleh KPU Kabupaten/Kota dalam logistik Pemilu/ Pemilihan yang mana kasus tersebut mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara | Mekanisme pengadaan logistik tidak sesuai ketentuan dan kepatutan sehingga mengakibatkan kerugian negara | Kabag KUL/Kasubag Umum dan Logistik | Kewenangan Pengadaan Jenis Logistik oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota | internal | C | Pengadaan untuk pemenuhan kekurangan logistik | Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan, Pemilih | Proses Pengawasan terkait Pengadaan Logistik | Mekanisme pengadaan logistik tidak sesuai ketentuan dan kepatutan sehingga mengakibatkan kerugian negara | Operasional |
| 61 | Persentase KPU Kab/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu | KPU Kab/Kota mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan tidak tepat jenis, jumlah dan waktu | Tidak sesuainya logistik atau perlengkapan TPS yang digunakan pada hari H | Kabag KUL/Kasubag Umum dan Logistik | Kondisi Cuaca dan keadaan geografis masing-masing wilayah, serta terbatasnya sarana transportasi | Eksternal | C | Terganggunya waktu pemungutan dan penghitungan suara di TPS | KPU dan Peserta Pemilihan, juga masyarakat umum | memetakan kondisi geografis masing masing daerah, mulai dari jarak sampai kepada moda transportasi | Tidak sesuainya logistik atau perlengkapan TPS yang digunakan pada hari H | Operasional |
| 62 | Persentase KPU Kab/Kota yang memelihara dan menginventarisir logistik Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku | KPU Kab/Kota yang memelihara dan menginventarisir logistik Pemilu/ Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku | Pengelolaan logistik khususnya penghapusan logistik eks Pemilu / Pemilihan terhambat | Kabag KUL/Kasubag Umum dan Logistik | Kurangnya dukungan sarana dan prasarana serta personil | internal | C | Kondisi gudang Penyimpanan logistik yang tidak sesuai kapasitas, serta administrasi pengelolaan logistik yang kurang baik | KPU Kab/Kota | Sosialisasi terkait regulasi Pengelolaan logistik pasca Pemilihan di perbanyak | Pengelolaan logistik khususnya penghapusan logistik eks Pemilu / Pemilihan terhambat | Operasional |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|-------------------------------------|---|---------------------|---|--|--|--|--|-------------|
| 63 | Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melakukan penyusunan Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu | KPU Kabupaten/Kota tidak melakukan penyusunan Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu | Penyajian Informasi pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan dalam laporan logistik kurang memadai baik untuk KPU maupun Pihak luar | Kabag KUL/Kasubag Umum dan Logistik | Keterbatasan dokumen pendukung | internal | C | Penyajian Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan secara umum kurang memadai | KPU dan Pihak Luar | Pengaplikasian Sistem Informasi dalam pengelolaan logistik | Penyajian Informasi pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan dalam laporan logistik kurang memadai baik untuk KPU maupun Pihak luar | Operasional |
| 64 | Persentase penyediaan logistik Pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu | Penyediaan logistik Pemilu tidak secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu | Terjadinya kesalahan distribusi logistik | Kabag KUL/Kasubag Umum dan Logistik | Regulasi yang tidak dipahami betul oleh penyelenggara Pemilu/Pemilihan, serta keterbatasan Penyedia | internal/ Eksternal | C | Kualitas Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara belum maksimal | KPU Provinsi/KPU Kab/Kota/ Badan Ad Hoc/ Peserta Pemilu/ Masy. | Pengawasan serta sosialisasi | Terjadinya kesalahan distribusi logistik | Operasional |
| 65 | Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan | Program Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan belum Maksimal | Belum maksimalnya kerjasama antara KPU dan Dukcapil | Kabag PDOS/Kasubag Program dan Data | Kerjasama antara KPU Kabupaten Kota dan Dukcapil tidak maksimal menyebabkan KPU Kab Kota kesulitan untuk mendapatkan data Pemilih Pemula terutama yg sudah merekam KTP el | internal/ Eksternal | | Ada beberapa KPU Kabupaten Kota yang Data Pemilih Pemulanya tidak ada gerakan/pemambahan dalam setiap bulannya | KPU Provinsi Sulut | Membangun Kerjasama dengan Dukcapil | Belum maksimalnya kerjasama antara KPU dan Dukcapil | operasional |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|--------------------------------------|---|----------|---|---------------------------------|--------------------|--|---|-------------|
| 66 | Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar | Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi tidak aman, handal dan lancar | Tidak adanya sistem perlindungan Teknologi Informasi yang memadai | Kabag PDOS/Kasub ag Program dan Data | Keterbatasan SDM untuk menciptakan sistem perlindungan aplikasi | Internal | C | Sasaran Kegiatan tidak tercapai | KPU Provinsi Sulut | Melakukan rekrutment SDM yang memiliki kemampuan dalam menciptakan sistem perlindungan untuk Teknologi Informasi | Tidak adanya sistem perlindungan Teknologi Informasi yang memadai | Operasional |
| 67 | Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Provinsi | Aplikasi KPU belum terintegrasi di KPU Provinsi | Sarana dan Prasarana di KPU Provinsi yang belum memadai | Kabag PDOS/Kasub ag Program dan Data | Anggaran untuk menyediakan sarana dan prasarana terbatas | Internal | C | Sasaran kinerja tidak tercapai | KPU Provinsi Sulut | Menyediakan sarana dan prasarana agar dapat melakukan integrasi dengan aplikasi yang diberikan dari KPU RI | Sarana dan Prasarana di KPU Provinsi yang belum memadai | Operasional |

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 9 Mei 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,
TTD
ARDILES M.R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan SDM

Charles Worotitjan

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 53 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO
DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL
AKTIVITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI UTARA TAHUN 2022

ANALISIS RISIKO / PETA RISIKO

| PETA RISIKO | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------|-------|---|--------|-------|----------------|---------------|
| | | | | | | | | |
| Unit Pemilik Risiko : | | KPU PROVINSI SULAWESI UTARA | | | | | | |
| Periode Penerapan : | | 2022 | | | | | | |
| No | Sisa Resiko | Kemungkinan | | Alasan | Dampak | | Tingkat Risiko | Profil Risiko |
| | | Uraian | Nilai | | Uraian | Nilai | | |
| 1 | Tidak adanya anggaran untuk program riset pemilihan di tingkat KPU Provinsi | Kemungkinan Sedang/ Moderat | 3 | Anggaran di masa Covid yang terbatas | Sedang | 3 | 9 | Tinggi |
| 2 | Pengetahuan terkait bidang penugasan masih belum merata | Kemungkinan Sedang/Moderat | 3 | Belum semua pegawai mengikuti Bimtek/Diklat terkait penugasannya, adanya perkembangan kebutuhan kompetensi teknis seiring dengan perkembangan teknologi informasi serta adanya mutasi ke bagian lainnya | Sedang | 3 | 9 | Tinggi |
| 3 | Pemeliharaan sarana dan prasarana kebutuhan kerja pegawai tidak konsisten dilakukan | Sangat Kecil/Jarang | 1 | 1) Tidak adanya dokumen SOP mekanisme pemeliharaan sarana dan prasarana; 2) Keterbatasan anggaran | Sedang | 3 | 3 | Rendah |
| 4 | Target kinerja dalam Renstra tidak dipahami secara menyeluruh, dan Perjanjian Kinerja hanya sekedar ditandatangani tanpa adanya evaluasi berkala terhadap upaya mencapai sasaran kinerja. | Kemungkinan Sedang/Moderat | 3 | Tidak adanya sosialisasi/Internalisasi Renstra termasuk indikator-indikator kinerja baik Indikator Kinerja Utama (IKU) Key Performance Indicator maupun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Sedang | 3 | 9 | Tinggi |
| 5 | Masih ada ketidakpatuhan terhadap mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan | Kemungkinan Sedang/Moderat | 4 | 1) Kesalahpahaman terhadap regulasi keuangan 2) Tidak adanya SOP pengelolaan keuangan 3) Kartu kendali keuangan belum terlalu detail | Besar | 4 | 16 | Ekstrem |

| | | | | | | | | |
|----|--|----------------------------|---|--|--------|---|----|--------|
| 6 | 8 area perubahan dan komponen penilaian dalam evaluasi Reformasi Birokrasi belum dilaksanakan secara konsisten dan merata | Kemungkinan Sedang/Moderat | 3 | Internalisasi, Perencanaan, Koordinasi dan Evaluasi pelaksanaan program reformasi birokrasi tidak berjalan secara kontinyu | Sedang | 3 | 9 | Tinggi |
| 7 | Manajemen program tahapan pemutakhiran pemilihan tidak berjalan dengan baik | Kemungkinan Sedang/Moderat | 3 | 1) SDM PPDP, PPS dan PPK yang tidak melaksanakan tugas sesuai kerangka waktu; 2) Adanya masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh PPDP, PPS dan PPK | Besar | 4 | 12 | Tinggi |
| 8 | Inisiatif kerjasama dengan instansi terkait rendah | Kemungkinan Kecil | 2 | Tidak dilakukan inventarisasi dan pemetaan terhadap instansi mana saja yang perlu dilakukan kerjasama | Sedang | 3 | 6 | sedang |
| 9 | Satker hanya berharap revisi tingkat eselon I/KPU RI dan tidak memaksimalkan kewenangan revisi oleh Satker/KPA | Kemungkinan Sedang/Moderat | 3 | Tidak dilakukan evaluasi terhadap realisasi anggaran dan kebutuhan anggaran untuk kinerja kegiatan lainnya | Sedang | 3 | 9 | Tinggi |
| 10 | KPU Kabupaten Kota belum konsisten menyusun dan melaporkan laporan monev program dan anggaran | Kemungkinan Sedang/Moderat | 3 | Tidak diprogramkannya pelaporan monev program anggaran dalam RPR sehingga mekanisme kontrol atau mengingatkan terkait waktu pelaporan tidak berjalan | Sedang | 3 | 9 | Tinggi |
| 11 | Sasaran kinerja tidak tersosialisasi dengan baik sehingga kegiatan untuk mencapai indikator kinerja yang ditetapkan tidak maksimal | Kemungkinan Sedang/Moderat | 3 | Tidak adanya sosialisasi dan pembahasan sasaran kinerja dan perjanjian kinerja serta evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja | Sedang | 3 | 9 | Tinggi |

| | | | | | | | | |
|----|---|----------------------------|---|--|--------|---|---|--------|
| 12 | Pelayanan kepegawaian tidak sesuai mekanisme dan standar layanan | Kemungkinan Sedang/Moderat | 3 | Tidak adanya SOP pelayanan kepegawaian yang menjadi panduan pelayanan kepegawaian tepat waktu dan akurat | Sedang | 3 | 9 | Tinggi |
| 13 | Mekanisme pengawasan disiplin pegawai tidak berjalan | Kemungkinan Kecil | 2 | 1) Tidak adanya SOP pengawasan dan evaluasi kepatuhan pegawai terhadap ketentuan tentang disiplin pegawai. 2) Kartu kendali rekapitulasi kehadiran pegawai tidak dibahas dan diakumulasi setiap pertambahan bulan dalam setahun masa kerja. 3) PP dan Peraturan kepala BKN tentang disiplin pegawai belum dipahami dengan baik | Sedang | 3 | 6 | sedang |
| 14 | Mekanisme masih kurang transparan | Kemungkinan sangat kecil | 1 | Tidak dilaksanakan internalisasi peraturan seleksi | Sedang | 3 | 3 | Rendah |
| 15 | Peraturan tentang seleksi PPNNP belum dipahami secara utuh | Kemungkinan Kecil | 2 | Tidak dilaksanakan internalisasi peraturan seleksi PPPK dan tidak dibuatkan SOP | Kecil | 2 | 4 | Rendah |
| 16 | Tahapan seleksi tidak dilaksanakan dengan konsisten | Kemungkinan Sedang/Moderat | 2 | Perencanaan kegiatan seleksi tidak akurat. Dukungan administrasi terhadap Timsel tidak maksimal | Sedang | 2 | 4 | Rendah |
| 17 | Adanya masalah pada calon pengganti antar waktu yang tidak diselesaikan dengan segera | Kemungkinan Sedang/Moderat | 3 | Kewenangan PAW berada di KPU RI; Tidak adanya standar waktu proses PAW | Sedang | 1 | 3 | Rendah |
| 18 | Operator tidak mengupdate Data Kepegawaian secara berkala | Kemungkinan Sedang/Moderat | 2 | Kurang Pengawasan dari Kasubbag SDM ke Operator, Beban Kerja Operator Berlebihan, Tidak ada SOP yang jelas | Sedang | 2 | 4 | Rendah |
| 19 | tidak adanya SOP di Bidang Kepegawaian yang menjadi panduan | Kemungkinan Sedang/Moderat | 3 | belum ada Rancangan kebijakan SOP sehingga tidak | Sedang | 3 | 9 | Tinggi |

| | | | | | | | | |
|----|--|-----------------------------|---|--|------------------|---|----|--------|
| | pelayanan kepegawaian yang tepat dan akurat | | | berjalan dengan baik | | | | |
| 20 | belum dilaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Fungsional Tata Kelola Pemilu | Kemungkinan sangat kecil | 1 | Implementasi di KPU Provinsi masih menunggu petunjuk KPU RI | Kecil | 2 | 2 | Rendah |
| 21 | Tahapan Badan adhoc oleh KPU Kab/Kota terhambat | Kemungkinan Sedang/Moderat | 3 | KPU Kabupaten/Kota tidak memahami alur tahapan dan perencanaannya tidak detail | Besar | 4 | 12 | Tinggi |
| 22 | Kurang dipahaminya peraturan pengelolaan anggaran | Kemungkinan Sedang/Moderat | 3 | Peraturan cepat berubah dan tidak ada waktu melakukan pembahasan pengelolaan keuangan sesuai peraturan yang baru | Besar | 4 | 12 | Tinggi |
| 23 | Keterlambatan penginputan data LPPA | Kemungkinan Sedang/Moderat | 3 | Data dukung terlambat dikumpul | Sedang | 3 | 9 | Tinggi |
| 24 | Keterlambatan penginputan data | Kemungkinan sangat kecil | 1 | Data dukung terlambat dikumpul | Sedang | 3 | 3 | Rendah |
| 25 | Belum adanya Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara KPU Provinsi Sulawesi Utara | Kemungkinan Kecil | 2 | Proses Verifikasi atas Pengusulan Penetapan Status Penggunaan BMN oleh KPU yang cukup lama | Tidak Signifikan | 1 | 2 | Rendah |
| 26 | Pemahaman terhadap PKPU Kearsipan sebagai acuan untuk menyusun Keputusan tentang kearsipan masih kurang | Kemungkinan Sedang/Moderat | 3 | PKPU tentang pengelolaan arsip belum terinternalisasi | Sedang | 3 | 9 | Tinggi |
| 27 | Belum adanya pengklasifikasi n arsip | Kemungkinan Sedang/ Moderat | 3 | Terbatasnya SDM serta belum adanya tenaga Arsiparis | Tidak Signifikan | 1 | 3 | Rendah |

| | | | | | | | | |
|----|--|-----------------------------|---|---|------------------|---|----|--------|
| 28 | Sarana transportasi masih kurang, sementara itu beberapa sarana transportasi tidak berfungsi dengan baik | Kemungkinan Kecil | 2 | Alokasi Anggaran Masih Kurang | Sedang | 2 | 4 | Rendah |
| 29 | Terjadinya kerusakan fasilitas perkantoran | Kemungkinan Kecil | 2 | Alokasi anggaran serta belum adanya kepemilikan tanah dan bangunan sendiri | Kecil | 2 | 4 | Rendah |
| 30 | Terjadinya kerusakan bagian gedung. Gudang masih dalam status sewa | Kemungkinan Sangat Kecil | 2 | Status kepemilikan Gedung dan Gudang yang masih di sewa/pinjam | Tidak Signifikan | 1 | 2 | Rendah |
| 31 | Tidak adanya staf yang ditugaskan untuk mencatat notula dan mendokumentasikan RPR | Kemungkinan Sedang/ Moderat | 3 | Staf belum belum terlatih membuat notulensi | Sedang | 3 | 9 | Tinggi |
| 32 | Kurangnya koordinasi dan antisipasi gangguan keamanan Tahapan Pemilu/ Pemilihan | Kemungkinan Sedang/ Moderat | 3 | Tidak adanya identifikasi potensi gangguan keamanan | Besar | 4 | 12 | Tinggi |
| 33 | Penanganan Pengaduan tidak berjalan dengan baik | Kemungkinan Kecil | 2 | SDM kurang memahami SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat | Sedang | 3 | 6 | Sedang |
| 34 | Tidak Berjalannya tindak lanjut Rekomendasi BPK dan APIP | Kemungkinan Sedang/ Moderat | 3 | Kurangnya Kesadaran dan rasa tanggung jawab atas rekomendasi yang akan ditindak lanjuti | Besar | 4 | 12 | Tinggi |
| 35 | 1) belum optimal dalam pelaksanaan SPIP di satker. 2) Operator terlambat mengupdate Data | Kemungkinan Sedang/Moderat | 3 | Kurangnya Pengawasan terhadap pelaksanaan SPIP | Sedang | 3 | 9 | Tinggi |
| 36 | Tidak dilakukan evaluasi secara berkala terhadap capaian indikator kinerja | Kemungkinan Kecil | 2 | Evaluasi rutin terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja tidak teragendakan | Sedang | 3 | 6 | Sedang |

| | | | | | | | | |
|----|--|----------------------------|---|---|--------------|---|----|--------|
| 37 | Tidak ada identifikasi kebutuhan kompetensi SDM dan program serta anggaran peningkatan kompetensi terbatas | Kemungkinan Sangat Kecil | 1 | Program Peningkatan Kompetensi SDM bergantung pada program KPU RI | Sedang | 3 | 3 | Rendah |
| 38 | PNS tidak fokus pada penyelesaian studi. Konsentrasinya terpecah dengan perhatian terhadap kerja, apalagi disaat tahapan | Kemungkinan Sedang/Moderat | 3 | Jadwal tahapan pemilu/ pemilihan yang padat | Kecil | 2 | 6 | Sedang |
| 39 | Rencana aksi reformasi birokrasi tidak tersusun dengan baik | Kemungkinan Sedang/Moderat | 3 | Tugas Tim Reformasi Birokrasi kurang dipahami | Sedang | 3 | 9 | Tinggi |
| 40 | Tidak tertata anggaran untuk pelaksanaan riset dan penerbitan jurnal kepemiluan | Kemungkinan Sedang/Moderat | 3 | Keterbatasan anggaran | Sangat kecil | 1 | 3 | Rendah |
| | | | | | | | | |
| 41 | SOP belum berjalan dengan baik | Kemungkinan Sedang/Moderat | 3 | SDM kurang memahami SOP | Kecil | 2 | 6 | Sedang |
| 42 | Prinsip - prinsip pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan belum maksimal | Kemungkinan Kecil | 2 | Regulasi Pengelolaan Logistik kurang relevan dengan kondisi lapangan | Sedang | 3 | 6 | Sedang |
| 43 | Adanya hambatan terhadap pelaksanaan tahapan | Kemungkinan Sedang/Moderat | 3 | Tidak ada identifikasi faktor yang berpotensi menghambat pelaksanaan tahapan, sehingga tidak ada langkah antisipasi | Besar | 4 | 12 | Tinggi |
| 44 | produk hukum yang dihasilkan belum sesuai | Kemungkinan Sedang/Moderat | 3 | SDM kurang memahami penyusunan produk hukum | Kecil | 2 | 6 | Sedang |
| 45 | SOP Pengungkapan produk hukum tidak disosialisasikan | Kemungkinan Sedang/Moderat | 3 | kurangnya koordinasi antar bagian dalam penyajian Produk Hukum | Kecil | 2 | 6 | Sedang |

| | | | | | | | | |
|----|---|----------------------------|---|---|---------|---|----|--------|
| 46 | Adanya perbedaan pemahaman antara penyelenggara dan peserta pemilu | Kemungkinan Sedang/Moderat | 3 | Penyelenggara Pemilu kurang memahami Tupoksi | Sedang | 3 | 9 | Tinggi |
| 47 | penanganan sengketa belum maksimal | Kemungkinan Sedang/Moderat | 3 | Kurang pemahaman terkait penanganan sengketa, kurang koordinasi | Sedang | 3 | 9 | Tinggi |
| 48 | Jadwal tahapan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertentangan dengan jadwal oleh KPU | Kemungkinan Tinggi | 3 | Jadwal yang ditetapkan oleh KPU terlambat sehingga tidak ada ruang untuk dilakukannya konsultasi, koordinasi dan supervisi serta bimtek secara berjenjang | Tinggi | 3 | 9 | Tinggi |
| 49 | Adanya penetapan Daerah Pemilihan yang tidak akurat | Kemungkinan Sedang | 2 | KPU Kabupaten/Kota tidak berkoordinasi dengan pemangku kepentingan yang membidangi data pemekaran wilayah administrasi daerah | Ekstrim | 4 | 8 | Tinggi |
| 50 | PAW dilakukan lebih dari 5 hari | Sedang | 2 | Para pegawai yang membidangi tugas tidak menjalankan sesuai SOP | Sedang | 3 | 6 | Sedang |
| 51 | Layanan terhadap Calon Peserta Pemilu tidak memuaskan | Tinggi | 3 | Para pihak yang diberi tugas tidak menjalankan sesuai SOP | Tinggi | 4 | 12 | Tinggi |
| 52 | Pekerjaan penyusunan pedoman/desain/template dilaksanakan tidak terprogram dan terpola | Sedang | 2 | Para pihak tidak melakukan analisa kebutuhan Pemilu di setiap tahapannya | Tinggi | 4 | 8 | Tinggi |
| 53 | KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota hanya berpedoman pada PKPU dan Juknis KPU RI | Tinggi | 4 | Ditetapkannya PKPU dan Juknis yang terlambat atau berdekatan dengan dimulainya setiap tahapan | sedang | 3 | 12 | Tinggi |
| 54 | Pusat Pendidikan Pemilih tidak terprogramkan | Sedang | 2 | Tidak tertata anggaran dalam DIPA | sedang | 2 | 4 | Rendah |
| 55 | Tidak terfasilitasi dengan anggaran | Sedang | 2 | Satker di KPU Sulut belum masuk dalam daerah | rendah | 2 | 4 | Rendah |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------------------------|---|--|--------|---|----|--------|
| | | | | percontohan di digitalisasi RPP | | | | |
| 56 | target volume kegiatan tidak didukung dengan anggaran | Sedang | 2 | Anggaran di masa pandemi Covid yang terbatas | sedang | 3 | 6 | Sedang |
| 57 | SOP belum tersusun dan dipahami personil PPID yang baru | Sedang | 2 | Tidak dilakukan internalisasi/ sosialisasi SOP | sedang | 3 | 6 | Sedang |
| 58 | Kompetensi SDM Bakohumas masih belum sesuai dengan harapan dan kegiatan publikasi di laman/ medsos belum sistematis | Sedang | 2 | Belum ada bimtek/training kepada personil Bakohumas serta belum disusunnya jadwal publikasi laman dan medsos | sedang | 3 | 6 | Sedang |
| 59 | Kekurangan anggaran pengadaan logistik | Kemungkinan Sedang/ Moderat | 3 | Regulasi Pengadaan dan Pengelolaan logistik yang berpengaruh pada perencanaan kebutuhan dan pengadaan logistik | Sedang | 3 | 9 | Tinggi |
| 60 | Mekanisme pengadaan logistik tidak sesuai ketentuan dan kepatutan sehingga mengakibatkan kerugian negara | Kemungkinan Besar | 4 | Kewenangan Pengadaan Jenis Logistik oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota | Sedang | 3 | 12 | Tinggi |
| 61 | Tidak sesuai logistik atau perlengkapan TPS yang digunakan pada hari H | Kemungkinan Sedang/ Moderat | 3 | Kondisi Cuaca dan keadaan geografis masing-masing wilayah, serta terbatasnya sarana transportasi | Besar | 4 | 12 | Tinggi |
| 62 | Pengelolaan logistik khususnya penghapusan logistik eks Pemilu / Pemilihan terhambat | Kemungkinan Kecil | 2 | Kurangnya dukungan sarana dan prasarana serta personil | Tinggi | 4 | 8 | sedang |
| 63 | Penyajian Informasi pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan dalam laporan logistik kurang memadai baik | Kemungkinan Sedang/ Moderat | 3 | Keterbatasan dokumen pendukung | Kecil | 2 | 6 | sedang |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------------------------|---|---|--------|---|----|--------|
| | untuk KPU maupun Pihak luar | | | | | | | |
| 64 | Terjadinya kesalahan distribusi logistik | Kemungkinan Sedang/ Moderat | 3 | Regulasi yang tidak dipahami betul oleh penyelenggara Pemilu/Pemilihan, serta keterbatasan Penyedia | Besar | 4 | 12 | Tinggi |
| 65 | Belum maksimalnya kerjasama antara KPU dan Dukcapil | Kemungkinan Sedang/ Moderat | 3 | Kerjasama antara KPU Kabupaten Kota dan Dukcapil tidak maksimal menyebabkan KPU Kab Kota kesulitan untuk mendapatkan data Pemilih Pemula terutama yg sudah merekam KTP el | Sedang | 3 | 9 | Tinggi |
| 66 | Tidak adanya sistem perlindungan Teknologi Informasi yang memadai | Kemungkinan Sedang/ Moderat | 3 | Keterbatasan SDM untuk menciptakan sistem perlindungan aplikasi | Sedang | 3 | 9 | Tinggi |
| 67 | Sarana dan Prasarana di KPU Provinsi yang belum memadai | Kemungkinan kecil | 2 | Anggaran untuk menyediakan sarana dan prasarana terbatas | Sedang | 2 | 4 | rendah |

Ditetapkan di Manado

Pada tanggal 9 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

ARDILES M.R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan SDM



Carles Worotitjan

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 53 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO
DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL
AKTIVITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI UTARA TAHUN 2022

IDENTIFIKASI RISIKO/INDIKATOR RISIKO

| INDIKATOR RESIKO | | | | | | |
|---------------------|---|---|------------------|------------------|---|------------|
| Unit Pemilik Risiko | | : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA | | | | |
| Periode Penerapan | | : 2022 | | | | |
| No | Sisa Risiko | Tingkat Risiko | Prioritas Risiko | Toleransi Risiko | Indikator Risiko | |
| | | | | | Indikasi | Batas Aman |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Tidak adanya anggaran untuk program riset kepemiluan di tingkat KPU Provinsi | 9 | 30 | 8 | Adanya minimal 1 kegiatan riset kepemiluan | 100% |
| 2 | Pengetahuan terkait bidang penugasan masih belum merata | 9 | 31 | 9 | Persentase pegawai yang mengikuti diklat/bimtek sesuai bidang penugasannya | 90% |
| 3 | Pemeliharaan sarana dan prasarana kebutuhan kerja pegawai tidak konsisten dilakukan | 3 | | 3 | - | - |
| 4 | Target kinerja dalam Renstra tidak dipahami secara menyeluruh, dan Perjanjian Kinerja hanya sekedar ditandatangani tanpa adanya evaluasi berkala terhadap upaya mencapai sasaran kinerja. | 9 | 29 | 8 | Persentase pegawai yang mengikuti sosialisasi/internalisasi Renstra | 75% |
| 5 | Masih ada ketidakpatuhan terhadap mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan | 16 | 1 | 15 | Persentase SOP dan kartu kendali pengelolaan keuangan yang disusun dan disosialisasikan | 100% |
| 6 | 8 area perubahan dan komponen penilaian dalam evaluasi Reformasi Birokrasi belum dilaksanakan secara konsisten dan merata | 9 | 28 | 9 | Persentase rencana aksi reformasi birokrasi yang direalisasikan | 90% |
| 7 | Manajemen program tahapan pemutakhiran pemilih tidak berjalan dengan baik | 12 | 9 | 12 | Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sesuai dengan regulasi | 100% |
| 8 | Inisiatif kerjasama dengan instansi terkait rendah | 6 | 49 | 5 | Persentase Satker yang melakukan kerjasama melalui Nota Kesepahaman atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi | 90% |
| 9 | Satker hanya berharap revisi tingkat eselon I/KPU RI dan tidak memaksimalkan kewenangan revisi oleh Satker/KPA | 9 | 22 | 9 | Persentase Satker yang melakukan revisi DIPA | 90% |
| 10 | KPU Kabupaten Kota belum konsisten menyusun dan melaporkan laporan monev program dan anggaran | 9 | 21 | 8 | Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyusun dan melaporkan laporan Monev program dan anggaran secara berkala | 90% |
| 11 | Sasaran kinerja tidak tersosialisasi dengan baik sehingga kegiatan untuk mencapai indikator kinerja yang ditetapkan tidak maksimal | 9 | 26 | 8 | Persentase Satker yang mensosialisasikan sasaran kinerja | 90% |

| | | | | | | |
|----|--|----|----|----|---|------|
| 12 | Pelayanan kepegawaian tidak sesuai mekanisme dan standar layanan | 9 | 27 | 9 | Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat | 90% |
| 13 | Mekanisme pengawasan disiplin pegawai tidak berjalan | 6 | 48 | 6 | Persentase Monitoring dan Evaluasi Penegakkan Disiplin Pegawai | 60% |
| 14 | Mekanisme masih kurang transparan | 3 | - | 3 | - | - |
| 15 | Peraturan tentang seleksi PPNPN belum dipahami secara utuh | 4 | - | 4 | - | - |
| 16 | Tahapan seleksi tidak dilaksanakan dengan konsisten | 4 | - | 4 | - | - |
| 17 | Adanya masalah pada calon pengganti antar waktu yang tidak diselesaikan dengan segera | 3 | - | 3 | - | - |
| 18 | Operator tidak mengupdate Data Kepegawaian secara berkala | 4 | - | 4 | - | - |
| 19 | tidak adanya SOP di Bidang Kepegawaian yang menjadi panduan pelayanan kepegawaian yang tepat dan akurat | 9 | 25 | 9 | Jumlah Rancangan Kebijakan Bidang Kepegawaian | 90% |
| 20 | belum dilaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Fungsional Tata Kelola Pemilu | 2 | - | 4 | - | - |
| 21 | Tahapan Badan adhoc oleh KPU Kab/Kota terhambat | 12 | 6 | 12 | Persentase KPU Kabupaten Kota yang melaksanakan rekrutmen badan ad hoc tepat waktu | 100% |
| 22 | Kurang dipahaminya peraturan pengelolaan anggaran | 12 | 2 | 12 | Persentase pengelola keuangan yang mengikuti Bimtek Pengelolaan Keuangan | 90% |
| 23 | Keterlambatan penginputan data LPPA | 9 | 13 | 9 | Persentase Satker yang menginput data LPPA tepat waktu | 100% |
| 24 | Keterlambatan penginputan data | 3 | - | 3 | - | - |
| 25 | Belum adanya Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara KPU Provinsi Sulawesi Utara | 2 | - | 2 | - | - |
| 26 | Pemahaman terhadap PKPU Kearsipan sebagai acuan untuk menyusun Keputusan tentang kearsipan masih kurang | 9 | 24 | 8 | Persentase KPU Kab/Kota yang melakukan internalisasi PKPU Kearsipan | 75% |
| 27 | Belum adanya pengklasifikasian arsip | 3 | - | 3 | - | - |
| 28 | Sarana transportasi masih kurang, sementara itu beberapa sarana transportasi tidak berfungsi dengan baik | 4 | - | 4 | - | - |
| 29 | Terjadinya kerusakan fasilitas perkantoran | 4 | - | 4 | - | - |

| | | | | | | |
|----|--|----|----|----|---|------|
| 30 | Terjadinya kerusakan bagian gedung. Gudang masih dalam status sewa | 2 | - | 2 | - | - |
| 31 | Tidak adanya staf yang ditugaskan untuk mencatat notula dan mendokumentasikan RPR | 9 | 32 | 9 | Persentase RPR yang memiliki risalah/notula rapat | 75% |
| 32 | Kurangnya koordinasi dan antisipasi gangguan keamanan Tahapan Pemilu/ Pemilihan | 12 | 10 | 11 | Persentase Satker yang melaksanakan koordinasi dengan pihak keamanan | 100% |
| 33 | Penanganan Pengaduan tidak berjalan dengan baik | 6 | 36 | 6 | Persentase Satker yang melaksanakan sosialisasi/internalisasi tata cara penanganan pengaduan | 90% |
| 34 | Tidak Berjalannya tindak lanjut Rekomendasi BPK dan APIP | 12 | 3 | 12 | Persentase rekomendasi BPK dan APIP yang ditindaklanjuti | 100% |
| 35 | 1) belum optimal dalam pelaksanaan SPIP di satker. 2) Operator terlambat mengupdate Data | 9 | 14 | 8 | Persentase Satker yang melaksanakan pembahasan dan pelaporan kartu kendali SPIP tepat waktu | 100% |
| 36 | Tidak dilakukan evaluasi secara berkala terhadap capaian indikator kinerja | 6 | 37 | 6 | Persentase Satker yang melakukan evaluasi semesteran terhadap capaian kinerja berdasarkan Renstra, IKU dan PK | 100% |
| 37 | Tidak ada identifikasi kebutuhan kompetensi SDM dan program serta anggaran peningkatan kompetensi terbatas | 3 | - | 3 | - | - |
| 38 | PNS tidak fokus pada penyelesaian studi. Konsentrasinya terpecah dengan perhatian terhadap kerja, apalagi disaat tahapan | 6 | 38 | 6 | Persentase PNS yang melanjutkan studi yang melaporkan progres studinya | 80% |
| 39 | Rencana aksi reformasi birokrasi tidak tersusun dengan baik | 9 | 23 | 9 | Persentase Satker yang menyusun rencana aksi reformasi birokrasi | 90% |
| 40 | Tidak tertata anggaran untuk pelaksanaan riset dan penerbitan jurnal kepemiluan | 3 | - | 3 | - | - |
| | | | | | | |
| 42 | SOP belum berjalan dengan baik | 6 | 39 | 6 | Jumlah Surat Keputusan yang disusun sesuai dengan SOP | 90% |
| 43 | Prinsip - prinsip pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan belum maksimal | 6 | 40 | 6 | Persentase Badan ad hoc yang mengikuti Bimtek pengelolaan logistik | 100% |
| 44 | Adanya hambatan terhadap pelaksanaan tahapan | 12 | 5 | 11 | Persentase tahapan yang dilakukan identifikasi potensi masalah yang dapat menghambat tahapan | 80% |
| 45 | produk hukum yang dihasilkan belum sesuai | 6 | 41 | 6 | Persentase surat keputusan yang disusun sesuai ketentuan dan SOP | 90% |
| 46 | SOP Pengungkapan produk hukum tidak disosialisasikan | 6 | 42 | 6 | Persentase Satker yang menyusun SOP pengungkapan produk hukum ke dalam JDIIH dan mensosialisasikannya | 90% |

| | | | | | | |
|----|---|----|----|----|---|------|
| 47 | Adanya perbedaan pemahaman antara penyelenggara dan peserta pemilu | 9 | 15 | 9 | Persentase tahapan dimana dilaksanakan Rakor dengan peserta pemilu/ pemilihan atau stakeholder terkait | 90% |
| 48 | penanganan sengketa belum maksimal | 9 | 20 | 9 | Persentase KPU Kab/Kota yang mendapatkan Bimbingan Teknis Advokasi Penanganan Sengketa | 100% |
| 49 | Jadwal tahapan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertentangan dengan jadwal oleh KPU | 9 | 16 | 9 | Persentase KPU Kab/Kota yang mengikuti Bimtek/Rakor/Sosialisasi Tahapan dan Petunjuk/Pedoman Teknis | 100% |
| 50 | Adanya penetapan Daerah Pemilihan yang tidak akurat | 8 | 33 | 6 | Persentase KPU Kabupaten/ Kota yang mengkonsultasikan draft penetapan Dapil | 100% |
| 51 | PAW dilakukan lebih dari 5 hari | 6 | 43 | 6 | Persentase KPU Kab/Kota yang mengikuti Bimtek Pelaksanaan PAW | 100% |
| 52 | Layanan terhadap Calon Peserta Pemilu tidak memuaskan | 12 | 7 | 10 | Persentase staf yang terlibat dalam Helpdesk pelayanan calon peserta pemilu, yang mengikuti Bimtek | 100% |
| 53 | Pekerjaan penyusunan pedoman/desain/template dilaksanakan tidak terprogram dan terpola | 8 | 34 | 8 | Persentase dokumen rencana penyusunan pedomana/desain/template | 90% |
| 54 | KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota hanya berpedoman pada PKPU dan Juknis KPU RI | 12 | 8 | 10 | Persentase Pedoman Teknis Pilkada/Pemilihan dan SOP Pemilu/Pemilihan yang disusun | 80% |
| 55 | Pusat Pendidikan Pemilih tidak terprogramkan | 4 | - | 4 | - | - |
| 56 | Tidak terfasilitasi dengan anggaran | 4 | - | 4 | - | - |
| 57 | target volume kegiatan tidak didukung dengan anggaran | 6 | 44 | 6 | Adanya optimalisasi anggaran untuk memenuhi volume kegiatan Pendidikan Pemilih yang dibutuhkan | 80% |
| 58 | SOP belum tersusun dan dipahami personil PPID yang baru | 6 | 45 | 6 | Persentase dokumen SOP PPID KPU Sulut yang dibutuhkan dan tersusun | 80% |
| 59 | Kompetensi SDM Bakohumas masih belum sesuai dengan harapan dan kegiatan publikasi di laman/ medsos belum sistematis | 6 | 46 | 5 | Persentase kegiatan Bimtek kehumasan/ In Oficce training/ Kegiatan peningkatan kompetensi SDM Bakohumas yang terlaksana | 100% |
| 60 | Kekurangan anggaran pengadaan logistik | 9 | 17 | 8 | Persentase KPU Kab/Kota yang melakukan identifikasi kebutuhan logistik dan estimasi anggaran serta dilakukan reviu oleh KPU atau KPU Provinsi | 100% |
| 61 | Mekanisme pengadaan logistik tidak sesuai ketentuan dan keputusan sehingga mengakibatkan kerugian negara | 12 | 4 | 9 | Persentase Satker KPU Kabupaten/Kota yang mengikuti Bimtek pengadaan logistik Pemilu | 100% |
| 62 | Tidak sesuainya logistik atau perlengkapan TPS yang digunakan pada hari H | 12 | 11 | 10 | Persentase KPU Kab/Kota yang melakukan pengecekan dan sortir ketepatan jenis dan jumlah logistik tepat waktu sebelum dilakukan pengepakan dan pendistribusian | 100% |

| | | | | | | |
|----|--|----|----|---|---|------|
| 63 | Pengelolaan logistik khususnya penghapusan logistik eks Pemilu / Pemilihan terhambat | 8 | 35 | 8 | Persentase KPU Kab/Kota yang melakukan penghapusan logistik tepat waktu | 90% |
| 64 | Penyajian Informasi pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan dalam laporan logistik kurang memadai baik untuk KPU maupun Pihak luar | 6 | 47 | 6 | Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyajikan informasi pengelolaan logistik yang memadai sesuai dengan kartu kendali dan/atau template yang disusun KPU Provinsi | 100% |
| 65 | Terjadinya kesalahan distribusi logistik | 12 | 12 | 9 | Persentase KPU Kab/Kota yang melakukan pengecekan jenis logistik sesuai daerah tujuan distribusi, sebelum distribusi dilaksanakan | 100% |
| 66 | Belum maksimalnya kerjasama antara KPU dan Dukcapil | 9 | 18 | 9 | Persentase KPU Kab/Kota yang rutin berkoordinasi dengan Disdukcapil | 100% |
| 67 | Tidak adanya sistem perlindungan Teknologi Informasi yang memadai | 9 | 19 | 9 | Persentase KPU Kab/Kota yang melaksanakan SOP perlindungan teknologi informasi | 100% |

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 9 Mei 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

ARDILES M.R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan SDM



LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 53 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO
DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL
AKTIVITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI UTARA TAHUN 2022

KEGIATAN PENGENDALIAN / RENCANA AKSI PENGENDALIAN RISIKO

| RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO LEVEL AKTIVITAS | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|-----------------|----------------|---------------------------|------------------|
| Unit Pemilik Risiko | | : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA | | | | | | | |
| Periode Penerapan | | : 2022 | | | | | | | |
| No | Indikator Risiko | | Opsi Penangan-an | Kegiatan Pengendalian | Indikator Pengendalian | | Jadwal | Penanggung Jawab | Cad. Risiko (Rp) |
| | Indikasi | Batas Aman | | | Output | Target | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Persentase SOP dan kartu kendali pengelolaan keuangan yang disusun dan disosialisasikan | 100% | Tindakan segera dalam mengelola risiko (<i>unacceptable</i>) | <i>Menyusun dan mensosialisasikan SOP dan Kartu Kendali Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan</i> | Dokumen SOP dan laporan sosialisasi SOP; Dok Kartu kendali | 1 paket dok | tahun an | Kasubag Keuangan | |
| 2 | Persentase pengelola keuangan yang mengikuti Bimtek Pengelolaan Keuangan | 90% | Tindakan dalam mengelola risiko (<i>issue</i>) | <i>Melaksanakan Bimtek/Diklat pengelolaan keuangan kepada seluruh pengelola keuangan</i> | Laporan pelaksanaan dan evaluasi Bimtek | 1 dok | tahun an | Kasubag Keuangan | |
| 3 | Persentase rekomendasi BPK dan APIP yang ditindaklanjuti | 100% | sda | <i>Melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi BPK dan APIP</i> | dokumen tindak lanjut | 12 dok | bulan an | Kasubag Keuangan | |
| 4 | Persentase Satker KPU Kabupaten/Kota yang mengikuti Bimtek pengadaan logistik Pemilu | 100% | sda | <i>Melaksanakan Bimtek Pengadaan Logistik untuk mencegah kesalahan dalam proses pengadaan</i> | Dokumentasi koordinasi | 15 dok | Setiap tahapan | Kasubag Umum dan Logistik | |
| 5 | Persentase tahapan yang dilakukan identifikasi potensi masalah yang dapat menghambat tahapan | 80% | sda | <i>Identifikasi potensi masalah yang dapat menghambat tahapan pemilu/pemilihan dan merumuskan langkah pencegahan/preventif</i> | Dokumen hasil identifikasi potensi masalah/Daftar Inventarisasi Masalah | 1 paket | Tahun an | Semua Subag | |
| 6 | Persentase KPU Kabupaten Kota yang melaksanakan rekrutmen badan ad hoc tepat waktu | 100% | sda | <i>Menyusun format pelaporan dan meminta laporan berkala proses rekrutmen badan ad hoc</i> | Laporan progres kegiatan rekrutmen badan ad hoc | 1 paket laporan | tahapan | Kasubag Hukum dan SDM | |
| 7 | Persentase staf yang terlibat dalam Helpdesk pelayanan calon peserta pemilu, | 100% | sda | <i>Menempatkan SDM yang memiliki kompetensi pada helpdesk fasilitasi</i> | Laporan Bimtek Petugas Helpdesk Pelayanan | 1 dok | tahapan | Kasubag Teknis dan Hupmas | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|------|-----|---|---|-------------------|--------------------------|----------------------------|--|
| | yang mengikuti Bimtek | | | <i>pelayanan peserta pemilu melalui bimtek</i> | Peserta Pemilu | | | | |
| 8 | Persentase Pedoman Teknis Pilkada/Pemilihan dan SOP Pemilu/Pemilihan yang disusun | 80% | sda | <i>Melakukan penyusunan pedoman teknis dan/atau SOP setiap tahapan</i> | Dokumen SOP | 1 paket x 6 subag | Sebelum Tahapan | Kasubag Teknis dan Hupmas | |
| 9 | Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemutahiran data pemilih berkelanjutan sesuai dengan regulasi | 100% | sda | <i>Menyusun SOP Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan untuk menjaga proses sesuai regulasi</i> | Dokumen SOP KPU Kab/Kota | 1 dok x 12 Satker | tahun an | Kasubag Data dan Informasi | |
| 10 | Persentase Satker yang melaksanakan koordinasi dengan pihak keamanan | 100% | sda | <i>Koordinasi pelaksanaan tahapan dengan pihak keamanan</i> | Laporan hasil koordinasi | 16 satker | bulan an di masa tahapan | Kasubag Umum dan Logistik | |
| 11 | Persentase KPU Kab/Kota yang melakukan pengecekan dan sortir ketepatan jenis dan jumlah logistik tepat waktu sebelum dilakukan pengepakan dan pendistribusian | 100% | sda | <i>Menyusun SOP dan formulir cek list untuk pengecekan dan sortir ketepatan jenis dan jumlah logistik</i> | Dokumen SOP dan formulir cek list | 15 dok | Tahapan | Kasubag Umum dan Logistik | |
| 12 | Persentase KPU Kab/Kota yang melakukan pengecekan jenis logistik sesuai daerah tujuan distribusi, sebelum distribusi dilaksanakan | 100% | sda | <i>Pengecekan ketepatan jenis sesuai daerah tujuan distribusi</i> | Formulir cek list | 15 dok | Tahapan | Kasubag Umum dan Logistik | |
| 13 | Persentase Satker yang menginput data LPPA tepat waktu | 100% | sda | <i>Mengingatkan dan melakukan monitoring pelaporan LPPA sebelum deadline</i> | Laporan Monev penginputan data laporan keuangan | 16 Satker x 1 dok | bulan an | Kasubag Keuangan | |
| 14 | Persentase Satker yang melaksanakan pembahasan dan pelaporan kartu kendali SPIP tepat waktu | 100% | sda | <i>Melakukan mekanisme monitoring pelaksanaan SPIP</i> | Dokumen Rekapitulasi pengiriman kartu kendali | 16 satker | bulan an | Kasubag Hukum dan SDM | |
| 15 | Persentase tahapan dimana dilaksanakan Rakor dengan | 100% | sda | <i>Rakor dengan peserta pemilu atau stakeholder</i> | Laporan Rakor | 1 dok | Tahapan | Kasubag Teknis Penyelngg | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|------|-----|---|--|--|--------------------|----------------------------------|--|
| | peserta pemilu/ pemilihan atau stakeholder terkait | | | | | | | araan Pemilu | |
| 16 | Persentase KPU Kab/Kota yang mengikuti Bimtek/Rakor/Sos ialisasi Tahapan dan Petunjuk/Pedoma n Teknis | 100% | sda | <i>Melaksanakan Bimtek/Rakor/S osialisasi Pelaksanaan Tahapan dan Pedoman Teknis kepada KPU Kab/Kota</i> | Laporan Pelaksana an | 1 paket | Taha pan | Kasubag Teknis dan Hupmas | |
| 17 | Persentase KPU Kab/Kota yang melakukan identifikasi kebutuhan logistik dan estimasi anggaran serta dilakukan reuiu oleh KPU atau KPU Provinsi | 100% | sda | <i>Mematangkan proses perencanaan, dan pengelolaan logistik</i> | Dokumen perencana an logistik | 15 dok | Tahu nan | Kasubag Umum dan Logistik | |
| 18 | Persentase KPU Kab/Kota yang rutin berkoordinasi dengan Disdukcapil | 100% | sda | <i>Melakukan koordinasi rutin dalam rangka pemutahiran data pemilih dengan Disdukcapil</i> | Dokumen laporan hasil koordinasi | 15 dok | bulan an | Kasubag Data dan Informasi | |
| 19 | Persentase KPU Kab/Kota yang melaksanakan SOP perlindungan teknologi informasi | 100% | sda | <i>Menyusun standar keamanan teknologi informasi dan melakukan monitoring</i> | Dokumen SOP dan kartu kendali monitoring | 15 dok | Tahu nan | Kasubag Data dan Informasi | |
| 20 | Persentase KPU Kab/Kota yang mendapatkan Bimbingan Teknis Advokasi Penanganan Sengketa | 90% | sda | <i>Melaksanakan Bimtek Penanganan Sengketa</i> | Laporan Bimtek | 1 dok | Tahu nan | Kasubag Hukum dan SDM | |
| 21 | Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyusun dan melaporkan laporan Monev program dan anggaran secara berkala | 90% | sda | <i>Pelaporan monev realisasi program dan anggaran secara berkala</i> | Laporan Monev program dan anggaran | 12 dok | bulan an | Kasubag Perencana an | |
| 22 | Persentase Satker yang melakukan revisi DIPA | 90% | sda | <i>Melakukan optimalisasi anggaran dengan revisi DIPA untuk mengakomodir/ memperluas jangkauan kegiatan</i> | Dokumen revisi DIPA | Minimal 1 dok setiap semest er | seme stera n | Kasubag Perencana an | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|------|-----|---|--|--------------|-------------|-----------------------|--|
| 23 | Persentase Satker yang menyusun rencana aksi reformasi birokrasi | 90% | sda | <i>Penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi</i> | Laporan rencana aksi RB | 16 satker | tahun an | Kasubag Perencanaan | |
| 24 | Persentase KPU Kab/Kota yang melakukan internalisasi PKPU Kearsipan | 75% | sda | <i>Melakukan internalisasi PKPU Kearsipan</i> | Laporan pelaksanaan kegiatan internalisasi | 1 dok | tahun an | Kasubag Hukum dan SDM | |
| 25 | Jumlah Rancangan Kebijakan Bidang Kepegawaian | 90% | sda | <i>Menyusun SOP bidang kepegawaian</i> | Dokumen SOP | 1 paket dok | tahun an | Kasubag Hukum dan SDM | |
| 26 | Persentase Satker yang mensosialisasikan sasaran kinerja | 90% | sda | <i>Sosialisasi sasaran kinerja tiap Satker</i> | Dokumentasi sosialisasi | 16 Satker | tahun an | Kasubag Perencanaan | |
| 27 | Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat | 90% | sda | <i>Menyusun kartu kendali layanan kepegawaian</i> | dokumen kartu kendali | 1 paket dok | tahun an | Kasubag Hukum dan SDM | |
| 28 | Persentase rencana aksi reformasi birokrasi yang direalisasikan | 90% | sda | <i>1) Membentuk Tim Reformasi Birokrasi 2) Menyusun rencana aksi RB 3) Melakukan evaluasi capaian RB dengan pengisian LKE</i> | SK Tim RB, SK Rencana Aksi RB, Laporan Evaluasi Capaian RB | 2 SK 2 LKE | semester an | Kasubag Perencanaan | |
| 29 | Persentase pegawai yang mengikuti sosialisasi/internalisasi Renstra | 75% | sda | <i>Sosialisasi/internalisasi Renstra</i> | Laporan pelaksanaan Sosialisasi/internalisasi Renstra | 1 dok | tahun an | Kasubag Perencanaan | |
| 30 | Adanya minimal 1 kegiatan riset kepemiluan | 100% | sda | <i>Melakukan revisi anggaran/ Pengusulan program riset ke KPU RI/ Kerjasama dengan stakeholder/ riset mandiri/ riset PNS yg tugas belajar</i> | Laporan Hasil Riset Kepemiluan | 1 dok | tahun an | Kasubag Perencanaan | |
| 31 | Persentase pegawai yang mengikuti diklat/bimtek sesuai bidang penugasannya | 90% | sda | <i>Melaksanakan Bimtek/Diklat terkait Kompetensi Penugasan</i> | Laporan pelaksanaan Diklat/Bimtek pada 3 Bagian/bidang penugasan | 3 dok | tahun an | Kasubag Hukum dan SDM | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|------|---|--|---|-----------|------------|---------------------------|--|
| 32 | Persentase RPR yang memiliki risalah/notula rapat | 75% | sda | <i>Penjadwalan staf untuk menyusun risalah/notula RPR</i> | Jadwal penugasan petugas penyusun notula | 12 dok | bulan an | Kasubag Umum dan Logistik | |
| 33 | Persentase KPU Kabupaten/ Kota yang mengkonsultasikan draft penetapan Dapil | 100% | Diambil tindakan jika tersedia sumberdaya (Supplementary Issue) | <i>KPU Kab/Kota melakukan pemutakhiran data wilayah dan berkoordinasi berkala secara intensif dengan pemerintah daerah terkait data pemekaran wilayah administrasi baru, serta mengkonsultasikan draft Dapil kepada KPU Provinsi</i> | Tersusunnya Laporan Pemetaan Dapil dan Tersedianya Data Akurat Untuk Penyusunan Dapil Pemilu Tahun 2024 | 1 paket | tahapan | Kasubag Teknis dan Hupmas | |
| 34 | Persentase dokumen rencana penyusunan pedoman/desain /template | 90% | sda | <i>Melakukan analisa kebutuhan pada setiap tahapan</i> | Dokumen hasil analisa kebutuhan | 1 paket | tahun an | Kasubag Teknis dan Hupmas | |
| 35 | Persentase KPU Kab/Kota yang melakukan penghapusan logistik tepat waktu | 90% | sda | <i>Menyiapkan template yang berbasis Aplikasi sebagai data pendukung dan sarana monitoring</i> | Template berbasis aplikasi | 15 dok | Tahun an | Kasubag Umum dan Logistik | |
| 36 | - | - | sda | <i>Sosialisasi/internalisasi Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat</i> | Laporan pelaksanaan sosialisasi/internalisasi tata cara pengaduan | 16 satker | tahun an | Kasubag Hukum dan SDM | |
| 37 | Persentase Satker yang melakukan evaluasi semesteran terhadap capaian kinerja berdasarkan Renstra, IKU dan PK | 100% | sda | <i>Evaluasi capaian kinerja</i> | Laporan evaluasi capaian kinerja | 16 satker | semesteran | Kasubag Perencanaan | |
| 38 | Persentase PNS yang melanjutkan studi yang melaporkan progres studinya | 80% | sda | <i>Pelaporan progres studi</i> | Laporan progres studi | 2 dok | semesteran | Kasubag Hukum dan SDM | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|------|-----|---|---|-----------|---------|---------------------------|--|
| 39 | Jumlah Surat Keputusan yang disusun sesuai dengan SOP | 90% | sda | <i>Monitoring kepatuhan terhadap SOP</i> | kartu kendali kepatuhan terhadap SOP | 1 dok | | Kasubag Hukum dan SDM | |
| 40 | Persentase Badan ad hoc yang mengikuti Bimtek pengelolaan logistik | 100% | sda | <i>Mengoptimalkan pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan di tingkat satker</i> | Laporan | 1 dok | Tahunan | Kasubag Umum dan Logistik | |
| 41 | Persentase surat keputusan yang disusun sesuai ketentuan dan SOP | 90% | sda | <i>Mengendalikan penyusunan keputusan sesuai SOP</i> | Kartu kendali kepatuhan SOP | 1 dok | bulan | Kasubag Hukum dan SDM | |
| 42 | Persentase Satker yang menyusun SOP pengungkahan produk hukum ke dalam JDIH dan mensosialisasikannya | 90% | sda | <i>Penyusunan SOP Pengungkahan Produk Hukum di laman JDIH</i> | Dokumen SOP | 16 satker | Tahunan | Kasubag Hukum dan SDM | |
| 43 | Persentase KPU Kab/Kota yang mengikuti Bimtek Pelaksanaan PAW | 100% | sda | <i>Melakukan langkah-langkah koordinatif terjadwal segera setelah menerima Surat Pemberitahuan dari DPRD Provinsi</i> | Proses Pengusulan Calon PAW Tepat waktu | 1 paket | tahunan | Kasubag Teknis dan Hupmas | |
| 44 | Adanya optimalisasi anggaran untuk memenuhi volume kegiatan Pendidikan Pemilih yang dibutuhkan | 80% | sda | <i>Melakukan optimalisasi/revisi anggaran untuk memenuhi volume kegiatan pendidikan pemilih yang dibutuhkan</i> | Dokumen revisi anggaran | 1 paket | Tahunan | Kasubag Teknis dan Hupmas | |
| 45 | Persentase dokumen SOP PPID KPU Sulut yang dibutuhkan dan tersusun | 80% | sda | <i>Melakukan identifikasi kebutuhan SOP PPID dan melakukan penyusunan SOP</i> | Dokumen SOP | 1 paket | Tahunan | Kasubag Teknis dan Hupmas | |
| 46 | Persentase kegiatan Bimtek kehumasan/ In Office training/ Kegiatan peningkatan kompetensi SDM Bakohumas yang terlaksana | - | sda | <i>Melaksanakan Bimtek/In office training</i> | Dokumen laporan | 1 paket | Tahunan | Kasubag Teknis dan Hupmas | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|------|-----|---|--------------------------------|-------------------|----------|---------------------------|--|
| 47 | Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyajikan informasi pengelolaan logistik yang memadai sesuai dengan kartu kendali yang disusun KPU Provinsi | 100% | sda | <i>Pelaporan berkala informasi pengelolaan logistik dari KPU Kab/Kota</i> | Laporan berkala | 15 dok | Tahunan | Kasubag Umum dan Logistik | |
| 48 | Persentase Monitoring dan Evaluasi Penegakkan Disiplin Pegawai | 60% | sda | <i>Melakukan monitoring dan pengendalian penegakan disiplin pegawai</i> | Pelaporan kartu kendali hukdis | 1 dok | bulan an | Kasubag Hukum dan SDM | |
| 49 | Persentase Satker yang melakukan kerjasama melalui Nota Kesepahaman atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi | 90% | sda | <i>Kerja sama dengan stakeholder</i> | Dokumen NK atau PKS | 1 dok x 15 Satker | tahun an | Kasubag Perencanaan | |

Ditetapkan di Manado

Pada tanggal 9 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

ARDILES M.R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan SDM



Charles Worotitjan